



DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **39** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta hasil evaluasi Renja PD tahun lalu.

Pasal 4

- (1) Renja PD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN,
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,
BAB V : PENUTUP.
- (2) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKAPD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 15-8-2025
SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR ... 39

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 39 Tahun 2025
TANGGAL : 15 - 8 - 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;
- XXXV. KECAMATAN LEKOK;

- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

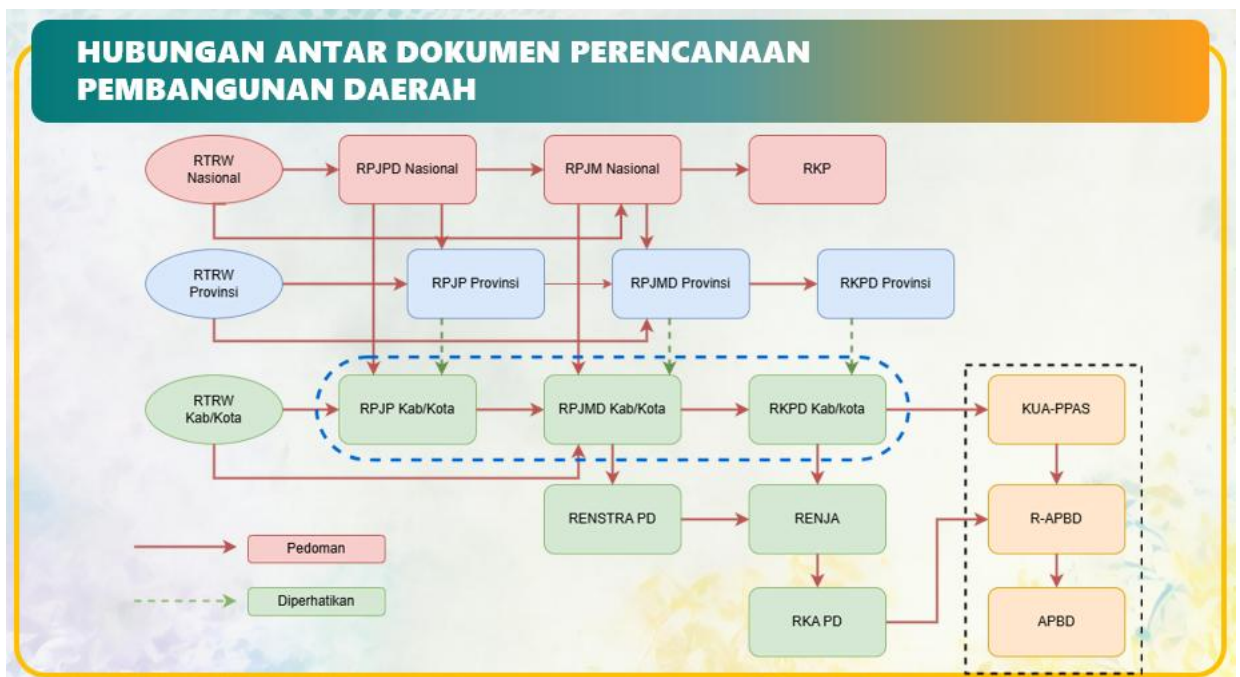
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), dimana perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan merupakan acuan perencanaan kegiatan selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 merupakan amanat yang mengacu dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 melalui “Hilirisasi Industri dan Pengolahan Potensi Unggulan Daerah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan turut berpartisipasi dalam prioritas pembangunan daerah 3 yaitu pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan turut berperan dalam peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan destinasi kepariwisataan. Selain itu, juga melalui optimalisasi pemanfaatan daerah

dengan program dan kegiatan prioritas berdasarkan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagan 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, khususnya peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman kumuh, pelayanan sanitasi yang layak, kebutuhan jalan lingkungan, rumah layak huni, dan optimalisasi data pertanahan untuk menunjang pembangunan kepentingan umum. Sasaran dan target tersebut diharap bisa tercapai dan terpenuhi di tahun 2026. Rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 secara normatif memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
18. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak

Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemeuan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 059-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 - 2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Nomor 192-4/2024);
38. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan

- Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
39. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026;
 40. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
 41. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 42. Peraturan Daerah Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
 43. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
3. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
4. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun 2026 dengan tetap memperhatikan dokumen RKPD, RPJMD dan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026
 - 3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026
 - 3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis
 - 3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK
RPJPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2024, dan realisasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun 2025 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada tahun sebelumnya. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024 dan perkiraan capaian target sampai dengan tahun 2025. Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2024, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun berjalan (tahun 2025) sebagaimana tampak pada Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Akhir Periode Renstra 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Subkegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2024)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Tahun n-1 (2025))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Realisasi Perangkat Daerah Tahun n-2 (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	100 %		100 %	93,9 %	93,90 %	100 %	96,95 %	96,95 %
11.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	88,89%
1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	66,67%

1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan		35 orang/bulan	35 orang/bulan	100%	33 orang/bulan	34 orang/bulan	80,95%
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100 %		100 %	68,8 %	68,80%	100 %	84,4 %	84,40%
1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang		70 orang	60 orang	85,71 %	66 orang	63 orang	525,00 %
1.04.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 orang		150 orang	44 orang	29,33 %	150 orang	97 orang	64,67%
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100,00 %
1.04.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	3 unit		1 unit	1 unit	100%	0 unit	1 unit	33,33%
1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 unit		7 unit	7 unit	100%	3 unit	10 unit	16,67%
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang opsional kantor yang tersedia	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	6 laporan		2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	66,67%
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 laporan		48 laporan	48 laporan	100%	48 laporan	96 laporan	88,89%
1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	80%

	Kantor	yang Disediakan								
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100 %		100 %	98 %	98%	100 %	99 %	99%
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	102 unit		42 unit	39 unit	92,86 %	39 unit	78 unit	76,47%
1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	210 unit		83 unit	83 unit	100%	83 unit	166 unit	79,05%
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	6 unit		2 unit	2 unit	100%	1 unit	3 paket	50%
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174 unit		58 unit	58 unit	100%	58 unit	116 unit	66,67%
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100 %		100 %	90,66 %	90,66%	100 %	95,33 %	95,33%
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 paket		25 paket	25 paket	100%	11 paket	36 dokumen	48%
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	90 paket		26 paket	24 paket	92,31 %	23 paket	47 unit	52,22%
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	147 paket		54 paket	43 paket	79,63 %	51 paket	94 unit	63,95%
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket		30 paket	24 paket	80%	11 paket	35 unit	58,33%

1.04.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 paket		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	66,67%
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 paket		50 laporan	46 laporan	92%	50 laporan	96 laporan	64%
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	33,86 %		22,82 %	18,39 %	80,59 %	28,34 %	28,34 %	83,70 %
1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan	15 titik		1 titik	1 titik	100%	0 titik	1 titik	6,67%
1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/Le galisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi	18 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	0 dokumen	1 dokumen	5,56%
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	164,11 ha		99,91 Ha	99,98 Ha	100%	144,11 Ha	144,11 ha	87,81%
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	12 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0%	2 dokumen	2 dokumen	16,67%
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	60 ha		4 Ha	4,07 Ha	101,75 %	8 Ha	12,07 Ha	20,12%
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab	58,74 %		51,71 %	50,01 %	96,71 %	55,23 %	55,23 %	94,02 %
1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	4500 unit rumah		573 unit	573 unit	100%	75 unit	648	14,40%
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,85 %		3,95 %	3,95 %	100%	7,9 %	7,9 %	66,67 %
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,85 %		3,95 5	3,95 %	100%	7,9 %	7,9 %	66,67%

1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	33,33%
1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	60 lokasi		97 lokasi	97 lokasi	100%	6 lokasi	103 lokasi	171,67 %
1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	15 laporan		3 laporan	3 laporan	100%	4 laporan	7 laporan	46,67%
1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	15 dokumen		5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 dokumen	66,67%
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase tercapainya pengembangan perumahan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1.04.02.2.01	<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota</i>	6 dokumen		14 dokumen	14 dokumen	100%	0 dokumen	14 Dokumen	233,33 %
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	0 dokumen	2 Dokumen	33,33%
1.04.02.2.01.0004	Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	0 dokumen	12 Dokumen	100%
1.04.02.2.03	<i>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%

1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	45 unit rumah		5 unit rumah	5 unit rumah	100%	5 unit rumah	10 unit rumah	22,22%
1.04.02.2.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	15 unit rumah		6 unit rumah	6 unit rumah	100%	6 unit rumah	12 Unit Rumah	80%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.10.04.2.01	<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/ Kota</i>	<i>Prosentase penyelesaian sengketa tanah garapan</i>	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.10.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 berita acara		1 berita acara	1 berita acara	100%	1 berita acara	2 berita acara	66,67%
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang termanfaatkan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
2.10.08.2.02	<i>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</i>	<i>Akumulasi luas tanah kosong yang didata</i>	3500 Ha 0		650 Ha	650 Ha	100%	0 Ha	650 ha	1,86%
2.10.08.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	9 laporan		9 laporan	9 laporan	100%	0 laporan	9 laporan	100%
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	71,19 %		43,51 %	50,42 %	115,88%	57,35 %	53,89 %	75,70 %
2.10.10.2.01	<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah</i>	2891 bidang tanah		250 bidang tanah	353 bidang tanah	141,20 %	2.889 bidang tanah	2.889 Ha	99,93%

2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	5 laporan	17 laporan	188,89 %
2.10.10.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	9 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	7 dokumen	8 dokumen	88,89%
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	100 %		99,83 %	99,83 %	100%	0 %	99,83 %	99,83 %
2.10.09.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah	6 rekomendasi		2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%	0 rekomendasi	2 rekomendasi	33,33%
2.10.09.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	6 dokumen		9 dokumen	9 dokumen	100%	0 dokumen	9 dokumen	150%

Hampir semua program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.A.

Tabel 2.1.A
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2024 - 2026 sampai dengan Tahun 2025
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target capaian renstra s/d Tahun 2025	Perkiraan Capaian Renstra s/d Tahun 2025	Faktor pendorong/ penghambat	Rencana Tindak Lanjut
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Program Kawasan Permukiman	83,70%	83,70%		
<i>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha</i>	87,81%	87,81%		
Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	16,67%	16,67%		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	13,33%	20,12%	Dari target penuntasan 20 Ha setiap tahunnya hanya bisa terealisasi 4,07 Ha di tahun 2024	Mengajukan usulan bantuan program setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,67%	14,40%	Dari target rehabilitasi RTLH 1.500 unit rumah setiap tahunnya, hanya bisa terealisasi 573 unit rumah di tahun 2024 dan 53 unit rumah di tahun 2025	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	66,67%	66,67%		
<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	66,67%	66,67%		
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6,67%	33,33%		

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	10%	171,67%	- Tahun 2024 mendapat anggaran DBHCHT untuk pembangunan jamban sehat sebanyak 2.335 unit. - Tahun 2025 tidak mendapat anggaran DBHCHT sehingga tidak ada alokasi anggaran untuk pembangunan jamban sehat.	Mengajukan usulan bantuan keuangan setiap tahunnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	26,67%	46,67%	Akan disusun SK Penetapan Status Jalan Lingkungan Kabupaten Pasuruan	Survey Updating dan Penetapan Status Jalan Lingkungan Kabupaten Pasuruan
Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	33,33%	66,67%	Sosialisasi dan Koordinasi Rencana Penetapan Jalan Lingkungan di Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan di tahun 2024	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait diantaranya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan
Program Pengembangan Perumahan	100%	100%		
<i>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	11,11%	22,22%	Tim Bencana melakukan survey untuk mengidentifikasi rumah terdampak bencana	Dilaksanakan sesuai jadwal
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Program Kabupaten/Kota	40%	80%	Pelaksanaan tahun 2025 menunggu nota dinas dari BPBD Kabupaten Pasuruan dan pergeseran anggaran dari BPKPD Kabupaten Pasuruan	Dilaksanakan sesuai jadwal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%		
<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>		
Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33,33%	66,67%	Melaksanakan sosialisasi terkait penyelesaian kasus pertanahan pada instansi yang membutuhkan	Ditindaklanjuti sesuai arahan
Program Penatagunaan Tanah	80,56%	75,70%		

<i>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota</i>	99,93%	99,93%		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	55,56%	188,89%	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) masih menunggu petunjuk dari provinsi terkait kegiatan tata batas	Ditindaklanjuti sesuai arahan
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	77,78%	88,89%	Untuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), petunjuk dari BPN Kabupaten Pasuruan untuk pelaksanaan menjadi kewenangan BPN Kabupaten	Dilaksanakan sesuai arahan

Sebagian besar program/kegiatan/sub kegiatan tercapai target kinerjanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang tepat sasaran dan tepat waktu,
- b. Perhitungan pagu anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mempunyai 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 3) Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Berdasarkan pernyataan sasaran di atas, untuk mewujudkan kinerja pelayanan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan langkah – langkah untuk menjawab permasalahan dan hasil analisa pelayanan kinerja Perangkat Daerah antara lain :

- 1) Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu dengan cara peningkatan kualitas sarana dan prasarana di permukiman kumuh skala kawasan;
- 2) Peningkatan prasarana sarana utilitas umum di perumahan dan permukiman, serta pemeliharaan prasarana sarana perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintahan Daerah untuk menciptakan hunian yang layak huni dan berkelanjutan serta mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru;
- 3) Peningkatan akses sanitasi layak dan aman;
- 4) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dilakukannya rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 5) Peningkatan layanan pertanahan dengan memenuhi kebutuhan administrasi dalam urusan pertanahan secara tertib dan tepat;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program yang sudah direncanakan sesuai dengan dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.

Pada tahun 2026, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengajukan usulan bantuan program kepada

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 14.000.000.000,- dan bantuan keuangan sebesar Rp. 3.647.500.000,-. Apabila usulan tersebut disetujui oleh Pemerintah Provinsi, diharapkan dapat memberikan daya ungkit terhadap capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Adapun bantuan program yang diusulkan yaitu penataan kawasan kumuh (yang ditetapkan dengan SK Bupati Walikota sesuai kewenangan provinsi dengan luasan 10-15 Ha) di Desa Tambaklekok - Kecamatan Lekok dan Desa Kalirejo - Kecamatan Kraton. Sedangkan untuk bantuan keuangan yang diusulkan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan jembatan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari.
- 2) Pembangunan jalan di Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil.
- 3) Pembangunan jamban keluarga di Kelurahan Gondangwetan, Desa Grogol, dan Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan.
- 4) Pembangunan MCK di Desa Andonosari, Desa Blarang, Desa Ngembal - Kecamatan Tukur, Desa Sukodermo - Kecamatan Purwosari, Desa Karanganyar - Kecamatan Kraton.

Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada Tabel 2.2 sebagaimana terlampir :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	Tahun n-2 (2024)	Tahun n-1 (2025)	Tahun n (2026)	Tahun n+1 (2027)	
	RENSTRA 2025 - 2029											
	Indikator Tujuan :											
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	-	-	77,19%	78%	79,28%	80,94%	77,19%	78%	79,28%	80,94%	
	Indikator Sasaran :											
1.1	Persentase Sarana Prasarana di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	-	-	43,69%	50,08%	55,44%	55,57%	43,69%	50,08%	55,44%	55,57%	
1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	82,90	82,91	82,92	82,93	82,90	82,91	82,92	82,93	
1.3	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	-	-	69,49	89,58	90,63	91,67	69,49	89,58	90,63	91,67	
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman											
-	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	√	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Formulasi : (Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x

												100%
-	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	√	√	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Sampai dengan tahun 2025 tidak ada program relokasi di Kabupaten Pasuruan. Formulasi : (Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / Jumlah
-	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	-	√	21,19%	24,87%	24,89%	24,91%	18,39%	24,87%	24,89%	24,91%	Formulasi : (Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha) x 100%
-	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-	√	4,87%	2,56%	3,50%	3,44%	2,57%	2,56%	3,50%	3,44%	Formulasi : (Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah Kabupate/Kota) x 100%
-	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	-	√	100%	29,83%	29,93%	30,03%	29,73%	29,83%	29,93%	30,03%	Tahun 2024 terjadi penurunan capaian realiasi dikarenakan salah dalam mengartikan definisi operasional dalam menghitung capaian IKK. Pada tahun 2023 yang dilaporkan adalah data : Jumlah Perumahan yang sedang Terbangun Terfasilitasi PSU dibagi dengan Jumlah Perumahan Kabupaten, dengan capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2024, kami laporkan data : Jumlah Unit Rumah yang Dibangun Terfasilitasi PSU dan diserahkan ke Pemda dibagi

												dengan Jumlah Unit Rumah di Perumahan Kabupaten, dengan capaian 29,73%, sehingga untuk target tahun 2025 - 2027 disesuaikan kembali. Formulasi : (Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota) x 100%
	Bidang Pertanahan											
-	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	-	√	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data diperoleh dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan. Formulasi : (Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) / Seluruh luas tanah yang diterbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)) x 100%
-	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-	√	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	Tahun 2024 - 2025 tidak ada permohonan penetapan lokasi. Formulasi : (Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum) x 100%
-	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	-	√	100%	48,82%	48,84%	48,86%	48,79%	48,82%	48,84%	48,86%	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sumber data diperoleh dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Formulasi : (Luas tanah yang telah

												dimanfaatkan sesuai peruntukan diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / Luas tanah diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan) x 100%
-	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-	√	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Tahun 2024 - 2025 tidak ada penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar atau sama dengan 0,5 Ha. Formulasi : (Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform) x 100%
-	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	-	√	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Izin lokasi sudah tidak menjadi kewenangan Pemda karena yang terbaru sudah ada Online Single Submission yang terintegrasi di Pusat (tidak melalui Pemerintah Daerah). Formulasi : (Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan) x 100%
-	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	-	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Formulasi :(Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan) x 100%

Keterangan :

- o Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023}} \times 100\% = (323/323) \times 100\% = 100\%$$

- o Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\% = \text{Tidak ada program relokasi di tahun 2024}$$

- o Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani

$$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\% = (99,98/543,75) \times 100\% = 18,39\%$$

- o Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\% = (14.687/572.149) \times 100\% = 2,57\%$$

- o Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten/Kota}} \times 100\% = (12.781/42.985) \times 100\% = 29,73\%$$

- o Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

$$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\% = (3.566.828/3.566.828) \times 100\% = 100\%$$

- o Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

$$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\% = 0\%$$

- o Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

$$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\% = (1.740.281/3.566.828) \times 100\% = 48,79\%$$

- o Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum

dan Tanah Absentee

$$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha;}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\% = (0/166) \times 100\%$$

- o Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi

$$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\% = (1/1) \times 100\%$$

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun sebelumnya, capaian kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, serta permasalahan pembangunan daerah yang tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dimana permasalahan yang menjadi urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu : (1) masih adanya kawasan permukiman kumuh; (2) belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan bencana; (3) belum tersedianya lahan relokasi untuk relokasi bagi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi yang terdampak bencana alam akibat tanah gerak dan program normalisasi kali Bangil Tak dan permasalahan yang menjadi urusan pertanahan yaitu : (1) belum adanya kepastian penyelesaian konflik tanah di kawasan hankam dan kawasan hutan; (2) masih adanya potensi konflik agraria di masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga mengacu pada grand design RKPDP Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, dengan turut mendukung prioritas pembangunan daerah ke-2 yaitu “Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/ usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas”.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Pelayanan SPM Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, salah satunya yaitu dengan mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara memadai. Di tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- untuk 5 unit rumah pada sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, dengan penerima sebagai berikut :

Tabel 2.3.A

Lokasi dan Alokasi Bantuan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT LENGKAP	BENCANA	KATEGORI BENCANA
1	SULISTIYONO	3514092008600001	Dusun Wetan Embong RT. 004 RW 009 Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo	Hujan dan Angin Kencang	Sedang
2	JULIANTO	3514120707970001	Dusun Sumbersuko RT. 005 RW. 002 Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol	Hujan dan Angin Kencang	Sedang
3	DEDY RAKHMAD	3514232811880000	Desa Kemantrenrejo RT. 004 RW. 002, Kec. Rejoso	Hujan dan Angin Kencang	Sedang
4	JUMAIYAH	3514075007550000	Desa Karangasem RT. 001 RW. 001, Kec. Wonorejo	Hujan dan Angin Kencang	Sedang
5	SARIPUJI NINGTIYAS	3514076005770000	Desa Karangsono RT. 003 RW. 002, Kec. Wonorejo	Hujan dan Angin Kencang	Sedang

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan rehabilitasi pasca bencana untuk sarana dan prasarana utilitas umum yang mengalami kerusakan sebagai berikut :

Tabel 2.3.B
Lokasi dan Alokasi Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Akibat Bencana Alam di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

NO.	JENIS BENCANA	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah samping Pure Dusun Ledoksari RT.02 RW.02 Desa Tosari Kec. Tosari	Rp 199.800.000
2	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Ngawas Desa Palangsari Kec. Puspo	Rp 649.350.000
3	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Kertoanom RT.05 RW.05 Desa Tosari Kec. Tosari	Rp 199.800.000
4	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Baledono Desa Baledono Kec. Tosari	Rp 154.290.000
5	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Tosari Dusun Ledoksari Kec. Tosari	Rp 449.550.000
6	Tanah Longsor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Ledoksari Desa Tosari Kec. Tosari (Jalan Menuju SMA TOSARI)	Rp 199.800.000
7	Konsultan Perencanaan	Semua Lokasi	Rp 91.020.000
8	Konsultan Pengawasan	Semua Lokasi	Rp 71.040.000
JUMLAH			Rp 2.014.650.000

(2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hingga tahun 2024 belum ada program Pemerintah Daerah terkait relokasi rumah bagi masyarakat. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan sedang merencanakan relokasi bagi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi yang terdampak bencana alam akibat tanah gerak sebanyak 58 unit rumah. Upaya yang sudah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu :

- Menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang didasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, ekonomi dan sosial pasca bencana.

- Penyusunan dokumen perencanaan menjadi landasan pengajuan bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk pembangunan rumah relokasi.
- Menyiapkan lahan yang berstatus tanah kas desa untuk relokasi warga.
- Melaksanakan sosialisasi langkah mitigasi, sesuai dengan rekomendasi Badan Geologi. Upaya yang dilakukan antara lain menutup retakan tanah dengan tanah liat dan menanam pohon dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

b. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak. Adapun rumah tidak layak huni yang ditangani adalah rumah yang tidak memenuhi aspek kesehatan dan aspek keselamatan.

Berdasarkan database RTLH Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, per Januari 2025 terdapat sisa RTLH sebanyak 14.687 unit rumah di Kabupaten Pasuruan. Untuk penanganan RTLH selama 6 tahun terakhir ini sebanyak 11.195 unit rumah yang anggarannya berasal dari berbagai sumber dana yaitu DAU, DAK, DBHCHT, Insentif Fiskal dan BSPS. Bantuan sosial untuk perbaikan RTLH di tahun 2025 ini sebanyak 51 unit rumah.

c. Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor 663/844/HK/424.013/2021 sebagai berikut :

Tabel 2.3.D
Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh per-Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Luasan Total (Ha)	Luasan Kumuh (Ha)	%
1	Rembang	5.717,62	36,82	0,64%
2	Lekok	4802,69	37,83	0,79%
3	Nguling	4547,36	20,37	0,45%
4	Kraton	5597,96	112,14	2,00%
5	Pohjentrek	1258,78	25,05	1,99%

6	Bangil	4355,33	137,66	3,16%
7	Purwosari	7879,98	70,5	0,89%
8	Beji	3899,63	103,38	2,65%
	Total	38.059,35	543,75	

Selama 5 (lima) tahun ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 95,91 Ha dari total 543,75 Ha kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, dengan rincian penanganan sebagai berikut :

Tabel 2.3.E
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 - 2024

No.	Tahun	Penanganan kumuh (Ha)	Akumulasi capaian (Ha)	Akumulasi capaian
1	2019	19,77	19,77	3,64%
2	2020	21,92	41,69	7,67%
3	2021	32,82	74,51	13,70%
4	2022	5,70	80,21	14,75%
5	2023	15,7	95,91	17,64%
6	2024	4,07	99,98	18,39%

Pada tahun 2024, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan fokus pada penyusunan masterplan kawasan permukiman kumuh dan DED perencanaan yang ditujukan untuk persiapan pengajuan usulan DAK integrasi di tahun 2026. Hal tersebut sebagai bentuk upaya dalam menjawab kendala dan permasalahan yang dihadapi mengapa sampai dengan tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan belum mengajukan usulan DAK integrasi.

- d. Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana perumahan

Penyediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dasar perumahan terus dilakukan. Diawali dengan pengumpulan data geospasial dari program-program yang telah dikerjakan. Selanjutnya dilakukan pemetaan sehingga bisa diketahui lokasi-lokasi yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana dasarnya. Sarana dan prasarana ini meliputi jalan lingkungan, tembok penahan tanah dan drainase lingkungan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

juga telah membuat Berita Acara Kesepakatan Pembagian Ruas Jalan Lingkungan Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Data Usulan Penetapan Fungsi Ruas Jalan, yang nantinya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

e. Pembangunan Jamban Sehat

Diperlukan peningkatan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat melalui kepemilikan jamban sehat keluarga, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

f. Pembangunan MCK Komunal

Terdapat tumpang tindih kewenangan OPD teknis dalam pemenuhan sanitasi layak, seperti pembangunan MCK komunal yang diampu oleh 2 (dua) Perangkat Daerah. Selama ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan membangun MCK komunal di wilayah permukiman, sedangkan Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang membangun MCK komunal di lingkungan pondok pesantren. Untuk itu perlu dilakukan pembagian kewenangan secara jelas pada OPD teknis dalam pemenuhan sanitasi layak berdasarkan cakupan layanan.

g. Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan PSU Pasca Penyerahan

Belum optimalnya penyerahan PSU perumahan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah dan pemeliharaan PSU pasca penyerahan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dibuatkan SOP terkait teknis penyerahan PSU perumahan dan pembiayaan untuk kegiatan pemeliharaan PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah. Hingga tahun 2024, terdapat 145 perumahan di Kabupaten Pasuruan, dan yang sudah menyerahkan PSU perumahannya sebanyak 31 perumahan.

h. Pemenuhan Database Rumah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan belum mempunyai database rumah yang menggambarkan jumlah, kepemilikan dan kondisi rumah. Hal ini berhubungan dengan penataan kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman. Di tahun 2024 ini, dialokasikan anggaran untuk menyusun dokumen pendataan rumah yang meliputi updating pendataan rumah tidak layak huni, dan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana.

- i. Peningkatan pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Peningkatan pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini untuk meminimalisir adanya sengketa tanah terhadap aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga untuk membantu proses dari rencana pemerintah menuju Satu Data.

- j. Peningkatan tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Peningkatan tata kelola aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan dengan melakukan survei dan pengukuran tanah milik instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah, yang bertujuan dalam mendukung penyediaan data berbasis elektronik.

Di tahun 2024 ini, dilakukan identifikasi perencanaan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan maksud untuk mewujudkan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih baik di wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut yaitu :

- Mengetahui lokasi dan luasan dari sebaran tanah aset pemerintah yang belum dilekati hak yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- Melakukan fungsi sistem informasi dalam rangka input, analisa dan pelaporan data mutakhir dari tanah aset pemerintah yang ada di Kabupaten Pasuruan;
- Memberikan arahan dalam upaya penyelesaian legalitas tanah aset pemerintah yang belum dilekati hak hasil identifikasi.

- k. Peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan

Percepatan peningkatan persetujuan penetapan lokasi pembangunan perlu dilakukan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Penetapan lokasi ini juga harus sesuai dengan kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara benar dan tuntas merupakan pintu gerbang menuju suksesnya pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

1. Penyediaan lahan bagi warga terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten

Dengan adanya rencana program relokasi bagi warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi yang terdampak bencana alam akibat tanah gerak sebanyak 58 unit rumah, dan rencana relokasi bagi warga yang terdampak program normalisasi kali Bangil Tak, maka dibutuhkan identifikasi dan penyediaan lahan untuk pembangunan rumah baru beserta sarana prasarana pendukung.

m. Identifikasi pemetaan pertanahan di Kabupaten Pasuruan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan melakukan identifikasi pemetaan pertanahan dengan 3 (tiga) kriteria yaitu Tanah Kas Desa, Tanah Aset Pemerintah Kabupaten, dan Tanah Kosong/ Terlantar sebagai berikut :

Tabel 2.3.I - Identifikasi Pemetaan di Bidang Pertanahan

No.	Kecamatan	Identifikasi Pemetaan																
		Tanah Kas Desa					Tanah Aset Pemkab					Tanah Kosong/ Terlantar				Tanah Timbul/ Oloran/ Retribusi		Eigendom
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Tot al	2021	2022	2023	2024	2023	2024	2024
1	Bangil	68					37	185	22	6	250	110					27.66 ha	
2	Beji	96					11	33			44		35					
3	Gempol		85				13		30	1	44	109						
4	Gondangwetan						15		26	2	43			28				
5	Grati						13		39	20	72	13						
6	Kejayan						10		28	30	68				20			
7	Kraton	256					6		30	2	38		28				45.71 ha	
8	Lekok				123		0			16	16			5				
9	Lumbang						8			41	49			6				
10	Nguling				301		3			43	46			16				
11	Pandaan		112				30	169			199	102						
12	Pasrepan						5		30		35			4				
13	Prigen		131				12			39	51				15			
14	Pohjentrek						0			16	16				17			
15	Purwodadi			362			2		43		45				11			
16	Purwosari	325					26	117		14	157		40					
17	Puspo						0	9			9							

18	Rejoso					1			10	11				19				
19	Rembang					2	2	28	73	105				23				
20	Sukorejo		89			18		19		37				17				
21	Tosari					0	25			25			3					
22	Tutur			76		5			27	32				3				
23	Winongan					4		25	2	31			25					
24	Wonorejo					7		38	2	47		29						
25	Pasuruan Kota								9	9								
Total		74	41	43	42	0	22	54	35	35	147	33	13	87	12	73,	0	0
		5	7	8	4		8	0	8	3	0	4	2		5	37		

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2025 - 2029 dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2025.

Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program, kegiatan, sub kegiatan prioritas, serta indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan/sub kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Lebih lanjut hasil analisis kebutuhan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pasuruan

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokas i	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasur uan	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100 %	7.839.995.18 6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasur uan	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	100 %	7.067.224.848,1 0
1.04.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Pasur uan</i>	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi</i>	<i>100 %</i>	<i>48.392.258</i>	<i>Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Kab. Pasur uan</i>	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi</i>	<i>100 %</i>	<i>59.841.454,85</i>
1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasur uan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokume n	23.340.908	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasur uan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokume n	39.768.054,85
1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasur uan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokume n	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasur uan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokume n	100.000,00
1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Pasur uan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 Laporan	23.051.350	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Pasur uan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	8 Laporan	19.973.400,00

	SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	100 %	6.057.158.917,26	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	100 %	4.868.756.680,10
1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	5.339.952.637,26	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/bulan	4.779.976.680,10
1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	597.206.280,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	7.480.000,00
1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	120.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.300.000,00
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan	100 Persentase	53.526.120	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Akurat dan Sesuai Ketentuan	100 %	140.456.120,00
1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	44.496.120	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	61 Orang	140.356.120,00
1.04.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	9.030.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000,00
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi	100 %	200.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pengadaan BMD yang Terealisasi	100 %	52.838.597,50
1.04.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	100.000,00

1.04.01.2.07.0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	52.738.597,50
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia	100 %	295.002.576	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia	100 %	509.233.821,00
1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2 Laporan	3.765.400	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	2 Laporan	3.665.500,00
1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	289.237.176	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	291.237.176,00
1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	214.331.145,00
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD Kondisi Baik	100 %	729.707.697	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase BMD Kondisi Baik	100 %	692.834.040,00
1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	539.453.364	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasuruan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	566.758.020,00
1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	83 Unit	6.080.580	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasuruan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	83 Unit	6.080.580,00
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2 Unit	127.650.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 Unit	55.500.000,00
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104 Unit	56.523.753	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kab. Pasuruan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91 Unit	64.495.440,00

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi		
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD	100 %	456.207.618	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD	100 %	743.264.134,65
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	10.506.150	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	10.347.812,94
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	31.232.070	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	31.071.175,50
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51 Paket	70.232.142	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 Paket	65.497.615,71
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	35.256.056	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasuruan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	34.103.530,50
1.04.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.661.200	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	39.494.000,00
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	281.320.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	562.750.000,00
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Pasuruan	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	19,49 %	1.923.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Pasuruan	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	19,49 %	664.799.970,00
1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Permohonan Izin yang Sesuai dengan RP2KP	1 Dokumen	20.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	Jumlah Rekomendasi Permohonan Izin yang Sesuai dengan RP2KP	1 Dokumen	100.000,00
1.04.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	100.000,00

1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh	100 %	80.000.000	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh	100 %	300.000,00
1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	100.000,00
1.04.03.2.02.0012	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok masyarakat	20.000.000	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok masyarakat	100.000,00
1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	100.000,00
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	105,98 Ha	1.823.000.000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	105,98 Ha	664.399.970,00
1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	30 Unit Rumah	666.000.000	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	30 Unit Rumah	100.000,00
1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	36.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	100.000,00
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	260.000.000,00

1.04.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1 Ha	1.000.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,1 Ha	100.000,00
1.04.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5 Unit	1.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10 Unit	100.000,00
1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	0,1 Ha	100.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Pasuruan	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha	403.999.970,00
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Pasuruan	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun	100 %	889.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kab. Pasuruan	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun	0,0039 %	1.982.318.750,00
1.04.04.2.01	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>Akumulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab</i>	50 Unit Rumah	889.000.000	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>Akumulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab</i>	101 Unit Rumah	1.982.318.750,00
1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	Rp 888.000.000	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	91 Unit Rumah	1.982.218.750,00
1.04.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit	1.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit	100.000,00

	Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Pasuruan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	5,08 %	1.166.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Pasuruan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	5,08 %	3.598.000.157,90
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan	0,74 %	1.166.000.000	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan	0,74 %	3.598.000.157,90
1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100.000.000,00
1.04.05.2.012.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6 Lokasi	1.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	17 Lokasi	3.497.500.157,90
1.04.05.2.012.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.000,00
1.04.05.2.012.0006	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Kab. Pasuruan	Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	1 Kelompok	2.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Kab. Pasuruan	Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	1 Kelompok	100.000,00
1.04.05.2.012.0007	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	100.000.000	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	100.000,00
1.04.05.2.012.0008	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	2.000.000	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi	100.000,00

1.04.05.2.012.00010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	50.000.000	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	5 Laporan	100.000,00
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Pasuruan	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi	2 %	2.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Pasuruan	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi	2 %	100.000,00
1.04.06.2.01	<i>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	Kab. Pasuruan	<i>Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan bagi Pengembang</i>	2 Sertifikat	2.000.000	<i>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	Kab. Pasuruan	<i>Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan bagi Pengembang</i>	2 Sertifikat	100.000,00
1.04.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	100.000,00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Pasuruan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	351.689.625,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kab. Pasuruan	Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Progam Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	210.800.000,00

1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	126.125.000	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.300.000,00
1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000,00
1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	5.125.000	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	10.000.000,00
1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000,00
1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000,00
1.04.02.2.02.0009	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1 kali	1.000.000	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1 kali	100.000,00
1.04.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	48 orang	1.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	58 orang	100.000,00

1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Presentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	223.564.625	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Presentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	200.300.000,00
1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	5 Unit Rumah	220.564.625	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	5 Unit Rumah	200.000.000,00
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	48 Rumah Tangga	1.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	58 Rumah Tangga	100.000,00
1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	48 Unit Rumah	1.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	58 Unit Rumah	100.000,00
1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	1.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah	100.000,00
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	100.000,00
1.04.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100.000,00
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Pasuruan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui	100 %	200.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Pasuruan	Persentase Terelesaiannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui	100 %	99.999.000,00

			Mediasi					Mediasi		
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	200.000.000	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	99.999.000,00
2.10.04.2.010.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	200.000.000	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	99.999.000,00
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	220.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	14.946.131.200,00
2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	220.000.000	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	14.946.131.200,00
2.10.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	100.000,00
2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000,00

2.10.05.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Laporan	200.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Laporan	14.945.931.200,00
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Pasuruan	Persentase Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	4,17 %	70.000.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Kab. Pasuruan	Persentase Tersedianya Tanah yang siap Direistribusikan	4,17 %	500.000,00
2.10.06.2.01	<i>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>Persentase Penetapan Redistribusi Tanah</i>	<i>4,17 %</i>	<i>60.000.000</i>	<i>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>Persentase Penetapan Redistribusi Tanah</i>	<i>4,17 %</i>	<i>400.000,00</i>
2.10.06.2.01.0002	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000,00
2.10.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000,00
2.10.06.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Kab. Pasuruan	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	1 Berita Acara	100.000,00
8.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat	1 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat	1 Laporan	100.000,00

	Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.		Kabupaten/Kota				Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.		Kabupaten/Kota		
2.10.06.2.02	Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penetapan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,67 Persentase	10.000.000		Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penetapan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,67 Persentase	100.000,00
2.10.06.2.02.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000		Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000,00
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Pasuruan	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana	4,17 %	547.600.000		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kab. Pasuruan	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana	4,17 %	100.000,00
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,17 %	547.600.000		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4,17 %	100.000,00
2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	547.600.000		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Pasuruan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000,00
				JUMLAH	13.209.284.811					JUMLAH	28.569.973.926,00

Keterangan :

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagai pengampu SPM Urusan Perumahan Rakyat akan mengalokasikan anggaran untuk penerapan SPM tahun 2026, baik untuk rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, maupun pendataan dan identifikasi dalam upaya fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- Penanganan kawasan kumuh rencananya akan diprioritaskan di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton dengan luasan 10,03 Ha dan Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok dengan luasan 13,38 Ha. Latar belakang dipilihnya Desa Kalirejo dan Desa Tambaklekok sebagai lokus tahun 2026 adalah untuk mendukung program prioritas “Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan”. Penanganan kawasan kumuh tersebut meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase lingkungan, penerangan jalan lingkungan, dan memperbaiki fasade bangunan, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 10.000.000.000,-. Untuk proses penyusunan perencanaan (DED) kawasan kumuh sudah dikerjakan di tahun 2024, dan terdapat 3 (tiga) lokasi yang menjadi target lokus perencanaan yaitu Desa Kalirejo di Kecamatan Kraton, Desa Tambaklekok di Kecamatan Lekok, serta Desa Penunggul di Kecamatan Nguling.
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni akan diprioritaskan di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton dan Desa Tambaklekok, Kecamatan Lekok untuk mendukung penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. Selain itu juga dialokasikan untuk perbaikan RTLH di Desa Wonosari, Kecamatan Gondangwetan untuk mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan di desa-desa lainnya sebagai upaya dalam mendukung program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program strategis nasional. Diharapkan bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan segera mengesahkan SK Penetapan Status Jalan Lingkungan di

Kabupaten Pasuruan di tahun 2025, dengan harapan bisa mengerjakan pembangunan jalan lingkungan di desa yang bukan menjadi aset desa dan kewenangan Perangkat Daerah lainnya di tahun 2026. Pembangunan jalan lingkungan tersebut untuk mendukung prioritas Bupati dalam peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukungan infrastruktur menuju daerah wisata. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah, untuk menciptakan hunian yang layak huni dan berkelanjutan, serta mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru.

- Untuk menunjang peningkatan akses sanitasi layak dan aman, maka perlu kepemilikan jamban sehat keluarga dari akses sanitasi sharing (ODF) ke akses layak per unit rumah tinggal serta untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting. Pembangunan jamban sehat keluarga yang dibutuhkan sebanyak 722 unit dengan anggaran Rp. 7.500.000,- per unit. Adapun lokasinya di Kecamatan Lekok (Desa Balunganyar, Desa Tambaklekok, Desa Jatirejo), Kecamatan Pasrepan (Desa Galih, Desa Sibon, Desa Ampelsari, Desa Tambakrejo), Kecamatan Gondangwetan (Kel. Gondangwetan, Desa Pekangkungan), Kecamatan Rembang (Desa Oro-oro Ombo Wetan, Desa Kalisat), Kecamatan Beji Desa Sidowayah, Kecamatan Nguling (Desa Watuprapat, Desa Sudimulyo).
- Pengembangan website atau aplikasi terkait PSU perumahan dan kawasan permukiman sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk inovasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.
- Pendataan rumah di Kabupaten Pasuruan dengan metode survey :
 - Identifikasi kategori rumah (layak huni/ rumah tidak layak huni, mengacu pada struktur bangunan, akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi dan legalitas lahan).
 - Jenis rumah (rumah tunggal, berderet, susun, sementara).
 - Kepemilikan rumah.
 - Data spasial dan tabulasi.

- Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan akan menyelesaikan :
 - Sengketa tanah di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,-.
 - Sengketa tanah di Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling.
 - Pembebasan lahan untuk pelebaran jalan di sisi timur alun-alun Bangil, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
 - Pembebasan lahan untuk kantor BPBD di Desa Raci, Kecamatan Bangil, dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- Identifikasi perencanaan pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan pendataan tanah absentee di Kabupaten Pasuruan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat, stakeholders dan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap program kegiatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang disampaikan melalui forum Musrenbang desa, Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah. Usulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rancangan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten untuk mematangkan/ memutakhirkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, selain harus berpedoman pada Renstra yang ada, juga harus mempertimbangkan hasil Musrenbang Kabupaten/ RKPD final yang mengarah pada dukungan pencapaian prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, usulan kegiatan dari masyarakat/ stakeholders dan Pokir DPRD disajikan pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN BANGIL					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jl. Kepiting/ Ketanen RW.03 Gempeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Ketanen RT.002 RW.003 Gempeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jl. Kepiting RT.008 RW.001 Gempeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kelurahan Pogar , Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kelurahan Pogar, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jl. Layur RT.009 RW.001 Gempeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
7	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Sili RT.016 RW.006 Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan., Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Manggis , Jalan DR.SUTOMO RT 001 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).

9	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Nanas RT 002 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
10	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan DR.Sutomo RT 002 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
11	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Kepiting RT 004 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
12	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Tongkol RT 003, RT 005 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
13	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan RW. 003 Kelurahan Kauman, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
14	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Pesanggrahan RT.03 RW.02 Gempeng, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RW 01 RW 02 RW 03 kelurahan kauman, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	kelurahan gempeng kecamatan bangil, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN FORUM PD					
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

1	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Bangil	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 paket	Pengadaan tanah dalam rangka pembebasan lahan pelebaran jalan timur alun-alun sampai swadesi
KECAMATAN BEJI					
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Ponimah Wonokoyo Barat Rt 04 Rw 02 Wonokoyo Beji, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN GEMPOL					
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Randupitu Kec. Gempol, Kab. Pasuruan	Persentase penyelenggaraan PSU di perumahan dan kawasan permukiman	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Ngerong, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN GONDANGWETAN					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RT. 001 RW. 002 Lingkungan Krajan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RT. 001 RW. 004 Lingkungan Jajar Tengah, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RT. 003 RW. 005 Lingkungan Jajar Lor, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RT. 003 RW. 005 Lingkungan Jajar Lor, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RT. 003 RW. 005 Lingkungan Jajar Lor, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Drainase RT. 2 RW. 2 Kelurahan gondangwetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Drainase RT. 3 RW. 5 Kelurahan Gondangwetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN KRAJAN RT 004 RW 002 DESA GROGOL KECAMATAN GONDANGWETAN, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 UNIT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Ranggeh Gondang wetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	1 UNIT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	SUMIATI Desa Sekar putih Kec. Gondang wetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 UNIT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	SAIRO Desa Sekar Putih Kec. Gondang Wetan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 UNIT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	DUSUN SENTUL RT 002 RW 003 DESA KARANG SENTUL KECAMATAN GONDANG WETAN, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Ds. Wonosari, Kec. Gondangwetan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	14 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN GRATI					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Tunon RT.02 s/d RT.03 RW.01, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Kresek RT.01 RW.02, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).

3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Kresek RT.01 RW.02 , Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Kresek RT.01 RW.02, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Beji Kremun RT.03 s/d RT.04 RW.03, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Prasan RT.01 sd RT.02 RW.05, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
7	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Kampung Baru RT.02 sd RT.03 RW.04, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Lingkungan Kampung Baru RT.01 RW.04, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tegalan III RT:002/RW:010, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Brandong RT 03 RW 02 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Dawe Kulon RT 02 RW 03 Desa Sumberdawesari, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Dawe Krajan RT 03 RW 05 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Krajan RT 03 RW 05, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Dawe Wetan RT 01 RW 06, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Dawe Wetan RT 03 RW 07, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
8	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Genuan RT 02 RW 10 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
9	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Genuan RT 02 RW 010, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

10	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Genu'an RT 002 RW 010, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN KEJAYAN					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kranggan RT 04 RW 01 Kelurahan Kejayan kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kranggan RT 02 RW 01 Kelurahan Kejayan kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN FORUM PD					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 03 RW. 01 Kranggan Kelurahan Kejayan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN KRATON					
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Tengah RT 002 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Krajan Barat RT 001 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Krajan Barat RT 002 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Pulokerto, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	dusun utara RT 01,02,03,04,05 RW 05, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Dsn Pesanggrahan Rt.002/003 Desa Slambrut, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kalirejo Kec. Kraton	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30	Perbaikan RTLH di Kawasan kumuh
8	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kalirejo Kec. Kraton	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	13,38 Ha	Penanganan kawasan kumuh
9	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Pulokerto Kec. Kraton	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 unit rumah	Perbaikan RTLH di Kawasan kumuh
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				

1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN KRAJAN II RT.002/RW.003 DESA PUKUL KEC KRATON, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Pelinggisan Kec. Kraton, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 unit rumah	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di WiL Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN LEKOK					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tambaklekok Kec. Lekok	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 unit rumah	Perbaikan RTLH di Kawasan kumuh
2	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Tambaklekok Kec. Lekok	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	10,03 Ha	Pemugaran kawasan kumuh
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Balung anyar Kec Lekok kab Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Rekonstruksi jalan pada ruas jalan kewenangan kabupaten
KECAMATAN LUMBANG					
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Tolip, Dsn Krajan Barat RT/RW 003/002 Desa Karangjati Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Siti Sismawati, Ds Karangjati RT/RW 008/004, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Namen Dsn Krajan timur RT/RW 009/004 Ds Karangjati, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Kana Dsn Krajan Timur RT/RW 008/004 Desa Karangjati Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Nur Iksan Ds Krajan Timur RT/RW 008/004 Karangjati Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Sulesno Dsn Krajan Barat RT/RW 004/002 Desa Karangjati Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Suntan, Dsn Krajan Timur RT/RW 008/004 Ds Karangjati Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
8	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Sujaman Dsn Lumbang III RT/RW 001/006 Ds Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
9	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Nama Suwoko Dsn Lumbang II RT/RW 001/001 Ds Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
10	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama Miskan Dsn Lumbang II RT/RW 004/001 Desa Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
11	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Sadi Dsn Lumbang II RT/RW 001/005 Desa Lumbang Kec winongan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
12	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama; Misatin Ds Lumbang I RT/RW 001/001 Desa Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
13	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Mochamad Wahono, Dsn Lumbang III RT/RW 002/007 Ds Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
14	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama ; Rohman, Ds Lumbang RT/RW 002/007 Desa Lumbang Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
15	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Adi Prayitno Dsn Lumbang III RT/RW 001/007 Desa Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
16	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Sutrianing, Dsn Lumbang I RT/RW 003/003 Desa Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

17	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama; Ngatemo Desa Lumbang RT/RW 003/005 Desa Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
18	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama Ngantiono Ds Lumbang III RT/RW 001/007 Ds Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
19	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama; Esti Ds Lumbang RT/RW 001/005 Ds Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
20	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama : Satupar Dsn Lumbang III Rt/rw 001/006 Ds Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
21	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama Sujani , Dsn Lumbang II RT/RW 002/005 Ds Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
22	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Nama Sohit, Dsn Lumbang II Kec Lumbang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
23	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Ds. Lumbang, Kec. Lumbang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 paket	Pembangunan dan Pemeliharaan TPT Lingkungan di Wil. Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN NGULING					
USULAN FORUM PD					

	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Sumberanyar, Kec. Nguling	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 berita acara	Penyelesaian tanah sengketa
KECAMATAN PANDAAN					
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wil. Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	DESA KEMIRI SEWU PANDAAN, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	DESA KEBONWARIS KECAMATAN PANDAAN, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Kelurahan Pandaan Kecamatan Pandaan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN PASREPAN					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Watugentong RT 004 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Cumpring RT 008 RW 004 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn krajan RT 002 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Cumpring RT 008 RW 004, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Daren RT 006 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Daren RT 006 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Cumpring RT 008 RW 004, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
8	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Krajan RT 002 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

9	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Watugentong RT 004 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
10	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Precet Desa Klakah Rt 01 Rw 02, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
11	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Japlakrejo Rt 001 Rw 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
12	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Krajan RT 002 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
13	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Cumpring RT 007 RW 004, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
14	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Cumpring RT 007 RW 004, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
15	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Krajan RT 001 RW 001, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

16	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Daren RT 005 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
17	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Daren RT 006 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
18	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Watugentong RT 004 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
19	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Watugentong RT 004 RW 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
20	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn Daren RT 005 RW 003, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
21	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN SAPULANTE RT 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
22	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN SAPULANTE RT 002, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

23	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Sapulante RT 002 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
24	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN PRODO RT 007, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
25	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Prodo Rt 007 Rw 002 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
26	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Prodo Rt 007 Rw 002 Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
27	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DUSUN SAPULANTE RT 005 , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bapak IKSAN Dusun Cumpring Rt.008 Rw.004 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan Kab.Pasuruan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	BAPAK BARAHIM Dusun Daret Rt.006 Rw. 03 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan Kab.Pasuruan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	BAPAK SOLEH Dusun Krajan Rt.002 Rw.001 Desa Ngantungan Kec.Pasrepan Kab.Pasuruan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	SUPA'ATIN Dusun Cumpring Rt.008 Rw.004 Desa Ngantungan Kecamatan Pasrepan Kab. Pasuruan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	NUR SALIM Dusun Cumpring Rt.008 Rw.004 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan Kab.Pasuruan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JUSUP Dusun Daren Rt006 Rw.003 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	MALI Dusun Cumpring Rt.008 Rw.004 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
8	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	RODI Dusun Krajan Rt.002 Rw.001 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

9	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	IMAM SYAFI'I Dusun Watugentong Rt.004 Rw.002 Desa Ngantungan Kec. Pasrepan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN POHJENTREK					
USULAN FORUM PD					
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan				
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Warungdowo, Kec. Pohjentrek	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 paket	Pengadaan tanah dalam rangka pengambilalihan oleh Pemkab terkait tanah sengketa
KECAMATAN PRIGEN					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RW. 001 Lingkungan Krajan Tengah Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RW. 001 Lingkungan Krajan Tengah Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RW. 001 Lingkungan Krajan Tengah Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 003 RW. 002 Lingkungan Krajan Barat Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 003 RW. 002 Lingkungan Krajan Barat, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)

6	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 001 RW. 002 Lingkungan Krajan Barat Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh) '- Lokasi di luar SK kumuh- Menyertakan foto dan titik koordinat, kebutuhan RAB
7	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 002 RW. 002 Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RW. 012 Lingkungan Taman Wisata Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
9	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 003 RW. 007 Lingkungan Genengsari Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
10	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT.003 RW. 007 Lingkungan Genengsari Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
11	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 001 RW. 008 Lingkungan Taman Wisata Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
12	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT.001 RW. 007 Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
13	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 003 RW. 007 Lingkungan Genengsari Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	181 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
14	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	RT. 001 RW. 007 Lingkungan Genengsari Kelurahan Pecalukan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				

1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Jl Semeru Kec Prigen (Depan SMPN 1 Prigen), Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Drainase Jalan Lingkungan Genengsari gang 3 Rw 10 Kel Pecalukan Kec Prigen, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wil Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN PURWODADI					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	rumah teriposa wahyu sri hartini dusun urung-urung rt 01rw 02, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	sri indarwati dusun sengon rt 01 rw 04, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	sri umiati dusun gondanglegi rt 02 rw 07, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	supiatun dusun gondanglegi rt 02 rw 07, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	rumah bapak nor hasan dusun gondanglegi rt 02 rw 07, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

			Diperbaiki		
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	rumah bapak kasdi dusun sridomo rt 06 rw 05, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	rumah bu marsiya dusun urung-urung rt 05 rw 02, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN FORUM PD					
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				
1	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Dsn Sempu, Ds. Cowek Kec. Purwodadi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	58 Rumah Tangga	Rencana relokasi Dsn Sempu karena bencana alam Tanah Gerak
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Jatisari Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di WiL Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Jatisari Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Penjalinan Desa Jatisari Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wi Perumahan & Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Jatisari Kec Purwodadi, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di WiL Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN PURWOSARI					

USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jln.Mukibat 1,2,3 RW.001 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jln.Pertukangan Barat RW.006 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Protong Barat RT.01,02 Rw.008 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
4	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Mukibat 1, 2, 3 RW.001 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
5	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jalan Pertukangan BARat RW.006 Kelurahan Purwosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	655 m2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Sekarmojo, Kec. Purwosari	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN PUSPO					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Dusun Sereng ORT 03 RW 02, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JIMBARAN PUSPO, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN REJOSO					
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Karangpandan, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Raket RT 01 RW 03 Desa Kawisrejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Telbuk RT 01 RW 05, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				

1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Kemantren RT 03 RW. 01 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Tanjung RT 01 RW03 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Gedug RT 03 RW 05 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Kemantren RT 03 RW 01 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	2 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Kemantren RT 03 RW 01 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Pejambon RT 03 RW 02 Desa Kemantren Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
7	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Paket	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
8	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Lirboyo Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Paket	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)

KECAMATAN REMBANG

USULAN ASPIRASI MASYARAKAT

	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Tampung Pejaten , Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	250x2,5 m	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh).
2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Tampung Selatan, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	250x2,5 m	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Wilayah Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Krengih Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan , Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
KECAMATAN SUKOREJO					
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	PAKUKERTO SUKOREJO, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Pembangunan & Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Wil Perumahan dan Permukiman (Lokasi diluar SK Kumuh)
KECAMATAN TUTUR					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DESA WONOSARI, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Tlogosari Kecamatan Tutur, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	20 unti rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Ds Kalipucang, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Sugro, Dusun Krajan I, Dusun Krajan II, Dusun Krajan III, Dusun Sawahtalun, Dusun Arjosari, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
5	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Dsn Sumberpitu 2. Dsn Dempok 3. Dsn Curah Buntung 4. Dsn Campal 5. Dsn Tuyowono, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
6	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dusun Krajan Timur, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	NGEMBAL TUTUR, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DS NGEMBAL KEC TUTUR, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
3	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan	KALIPUCANG TUTUR, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
4	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DS KALIPUCANG TUTUR, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN WINONGAN					
USULAN ASPIRASI MASYARAKAT					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Desa Karang Tengah, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
USULAN POKIR					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jl Desa Sruwi No.06 Desa Sruwi Kec.Winongan Kab.Pasuruan 67182 bapak Nali Rt.01 Rw.04 Desa Sruwi, Kab. Pasuruan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
KECAMATAN WONOREJO					
USULAN POKIR					
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Uum (PSU)				
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Dusun Pejaten Desa Tampung Kecamatan Wonorejo, Kab. Pasuruan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	242 m1	Rekonstruksi jalan pada ruas jalan kewenangan kabupaten
USULAN FORUM PD					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				

	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dsn. Sudan dan Dsn. Wonosari, Desa Wonosari, Kec. Wonorejo	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	15 unit rumah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan tahun 2025 - 2029 sebagai pedoman dan arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan. Arah tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Visi pembangunan nasional tahun 2025 - 2029 adalah :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa Pembangunan memerlukan Kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Pencapaian visi Presiden dilaksanakan melalui 8 misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat (*quick wins*). Adapun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung dan berperan dalam pembangunan sebagai berikut :

- Misi (Asta Cita) ke 3
“Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”.
- Prioritas Pembangunan ke 13
“Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”.
- Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) ke 7
“Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z,

dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)” yang diimplemetasikan kedalam kegiatan prioritas seperti :

- Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU
- Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu
- Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu

Prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan harus bersinergi dengan visi misi dan prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga mengacu pada rencana penggunaan pola ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa upaya penanganan/ pengelolaan kawasan permukiman dilakukan dengan cara :

- a. Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadi tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- b. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- c. Sarana dan prasarana di lingkungan permukiman dikembangkan secara proporsional sesuai kebutuhan, hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing, yang direkomendasikan secara teknis berdasarkan aturan/ketentuan yang berlaku;
- d. Pengembangan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia dan lingkungan permukiman tidak diperkenankan pengembangannya pada kawasan peruntukan permukiman;
- e. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- f. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan agrowisata, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil

- pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- g. Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - h. Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman yang disediakan oleh pengembang dan masyarakat, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
 - i. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
 - j. Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
 - k. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

Secara keseluruhan arahan pengembangan kawasan permukiman direncanakan pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman, dan tidak direncanakan pada kawasan lindung sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku, sebagaimana berikut :

1. Strategi pengembangan kawasan budidaya, salah satunya dengan mengembangkan kawasan permukiman dengan pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan peningkatan kualitas permukiman melalui pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni, ketersediaan aksesibilitas yang memadai, ketersediaan sarana-prasarana yang layak dan memadai serta memenuhi standar hidup.
2. Mengembangkan kawasan untuk kepentingan sosio-budaya, melalui upaya pelestarian kawasan baik sebagai benda cagar budaya dan

kawasan sekitarnya maupun kawasan permukiman yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus sebagai identitas kawasan.

3. Penetapan kawasan sempadan sungai yaitu pada sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter.
4. Saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase.

Berdasarkan analisa dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029, pada tahun perencanaan 2020 – 2024 dan 2025 – 2029, kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan umum Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat terkait penanganan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah kabupaten/kota;
2. Penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan SK Kumuh yang telah ditetapkan;
3. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
4. Pemerataan pembangunan infrastruktur di perumahan dan permukiman;
5. Pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun ke depan. Dalam menentukan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka perlu penyelarasan dengan tujuan dan sasaran yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengacu pada tujuan

ke-2 yaitu “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan” dengan sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan”.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 tersebut, maka disusun tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029. Tujuan jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yaitu **“Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan”**.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan diatas, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Indikator : Persentase sarana prasarana di perumahan dan permukiman dalam kondisi baik.
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- 3) Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Indikator : Indeks tertib administrasi pertanahan.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 3.2.A berikut :

Tabel 3.2.A
Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Target 2026
RENSTRA 2025 - 2029				
Tujuan :	Indikator Tujuan 1 :			
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	77,19%	78%	79,28%
Sasaran 1.1 :				
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Persentase Sarana Prasarana di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	43,69%	50,08%	55,44%

Sasaran 1.2 :				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,90	82,91	82,92
Sasaran 1.3 :				
Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	69,49	89,58	90,63
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SPM & IKK	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%
SPM & IKK	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	0%	0%	0%
IKK	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	18,39%	24,87%	24,89%
IKK	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,57%	2,56%	3,50%
IKK	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	29,73%	29,83%	29,93%
Bidang Pertanahan				
IKK	Persentase Pemanfaatan Tanah yang sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	100%	100%	100%
IKK	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0%	0%	0%
IKK	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	48,79%	48,82%	48,84%
IKK	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	0%	0%
IKK	Tersedianya Tanah untuk Masyarakat	0%	0%	0%
IKK	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	100%	100%

Penetapan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Sinkronisasi antara Indikator Sasaran RPJMD dengan IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2.B berikut :

Tabel 3.2 B
Sinkronisasi Indikator Sasaran RPJMD dan IKU
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029

INDIKATOR SASARAN RPJMD			IKU			Program
Indikator	Formulasi	Target 2026	Indikator	Formulasi	Target 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rata-rata (Indeks Aksesibilitas + Indeks Infrastruktur SDA Cipta Karya + Indeks Infrastruktur Perhubungan + Indeks Kinerja Pengolahan Sampah)	71,76	Indikator Tujuan : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	$\left(\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah rumah tangga keseluruhan}} \right) \times 100\%$	79,28 %	- Kawasan Permukiman - Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Sasaran 1.1 : Persentase Sarana Prasarana di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	$\left(\frac{\left(\frac{\text{Jumlah RTLH yang tertangani}}{\text{Jumlah RTLH Keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah SR air minum yang terbangun}}{\text{Jumlah kebutuhan SR keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jamban yang terbangun}}{\text{Jumlah kebutuhan jamban keseluruhan}} \times 100\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan}} \times 100\% \right)}{4} \right)$	55,44 %	- Kawasan Permukiman - Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

			<p>Sasaran 1.2 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p>	Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal	82,92	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a
			<p>Sasaran 1.3 : Indeks Tertib Administrasi Pertanahan</p>	$\left(\begin{aligned} & \left(\frac{\text{Jumlah permohonan pengadaan tanah yang diproses}}{\text{Jumlah permohonan pengadaan tanah}} \times 100\% \right) + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah penetapan persetujuan lokasi pembangunan}}{\text{Jumlah kebutuhan penetapan persetujuan lokasi pembangunan}} \times 100\% \right) + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah penyelesaian sengketa tanah}}{\text{Jumlah laporan sengketa yang masuk}} \times 100\% \right) + \\ & \left(\frac{\text{Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun (TKD)}}{\text{Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan (TKD)}} \times 100\% \right) \end{aligned} \right) / 4$	90,63	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan - Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Maksimum dan Tanah Absentee - Penatagunaan Tanah

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- Mendukung Astacita Presiden;
- Mendukung prioritas pembangunan daerah;
- Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yaitu kebijaksanaan dalam pengendalian serta pengawasan pada urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pertanahan;
- Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
- Pencapaian program prioritas dan proyek strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang mendukung program prioritas dan proyek strategis kabupaten;
- Pengentasan kemiskinan dengan cara peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat;
- Pendayagunaan potensi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dalam proses transisi diperlukan adanya review atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026.

Secara lebih detail hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan yang termuat dalam aplikasi SIPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Pemetaan Nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Tahun 2024-2026 Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Pada Aplikasi SIPD-RI Tahun 2026

DOKUMEN RENSTRA PD 2024 -2026					SIPD TAHUN 2026 (KEPMENDAGRI 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024)							SIPD TAHUN 2026 (PEMUTAKHIRAN)						
Kode Klasifikasi	Nomenklatur : 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Sub Kegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan Indikator	- Pemu takhir an; atau - Peno naktif an	Kode Klasifikasi	Nomenklatur : 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Sub Kegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan Indikator	KETERANGAN	- Pemu takhir an; atau - Peno naktif an	Kode Klasifikasi	Nomenklatur : 1) Bidang Urusan 2) Program 3) Kegiatan 4) Sub Kegiatan	Kinerja	1) Indikator 2) Formulasi Indikator	Satuan Indikator	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(19)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(19)
	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
Tujuan 1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	Tetap		Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Tetap	Tetap		Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Tetap
			Formula : ((Jumlah Rumah tangga yg menempati hunian layak dan terjangkau/ Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan)* 100 + (Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum/ Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan)* 100 + (Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani						Formula : (Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan / Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100%							Formula : (Jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan / Jumlah rumah tangga keseluruhan) x 100%		

			Jamban/Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan)* 100 + (Jumlah Rumah Tangga Terlayani Jalan Lingkungan/Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan)* 100 + Jumlah Rumah Tangga Terlayani Drainase Lingkungan/Jumlah Rumah Tangga Keseluruhan)* 100) / 5																
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		Persentase Sarana Prasarana Dasar di perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik	%	Tetap				Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	Tetap	Tetap					Persentase Sarana Prasarana Dasar di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	Tetap
			Formula : ((Jumlah RTLH yang tertangani/Jumlah RTLH keseluruhan)* 100 + (Jumlah SR air minum yang terbangun/Jumlah Kebutuhan SR air minum)*100 + (Jumlah jamban yang terbangun/Jumlah kebutuhan jamban)*100 + (Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik/jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan)* 100 + (Jumlah panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik/jumlah panjang						((Jumlah RTLH yang tertangani / Jumlah RTLH keseluruhan x 100%) + (Jumlah SR air minum yang terbangun / Jumlah kebutuhan SR keseluruhan x 100%) + (Jumlah jamban yang terbangun / Jumlah kebutuhan jamban keseluruhan x 100%) + (Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik / Jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan x 100%)) / 4								((Jumlah RTLH yang tertangani / Jumlah RTLH keseluruhan x 100%) + (Jumlah SR air minum yang terbangun / Jumlah kebutuhan SR keseluruhan x 100%) + (Jumlah jamban yang terbangun / Jumlah kebutuhan jamban keseluruhan x 100%) + (Jumlah panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik / Jumlah panjang jalan lingkungan keseluruhan x 100%)) / 4		

			drainase lingkungan keseluruhan)* 100)/5															
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya pengurangan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh (Indikator program 1)	%	Tetap	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	Tetap	Tetap	01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	Tetap
			Formula : luas kawasan kumuh yang ditangani / luas kawasan kumuh kabupaten * 100						Formula : (Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas total kawasan kumuh) x 100%							Formula : (Akumulasi luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas kawasan kumuh) x 100%		
1.04.03.201	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	Dokumen	Tetap	1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	Tetap	Tetap	1.04.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	Tetap
1.04.03.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	Pemutakhiran	1.04.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Kode klasifikasi berubah, sub kegiatan berubah, kinerja berubah, indikator berubah	Pemutakhiran	1.04.03.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	Kode klasifikasi berubah, sub kegiatan berubah, kinerja berubah, indikator berubah
1.04.03.201.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	Pennaktifan	1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	Masuk ke dalam Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Pennaktifan	1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	Masuk ke dalam Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

1.04.03.202	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kawasan kumuh yang dikendalikan	Titik	Tetap	1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Dikendalikan	%	Tetap	Tetap	1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh	%	Tetap
1.04.03.202.02	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen	Pemutakhiran	1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah	Pemutakhiran	1.04.03.2.02.0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah
1.04.03.202.03	Sub Kegiatan Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Pemutakhiran (kode klasifikasi)	1.04.03.2.02.0012	Sub Kegiatan Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	Kode klasifikasi berubah, indikator berubah, satuan indikator berubah	Pemutakhiran (kode klasifikasi)	1.04.03.2.02.0012	Sub Kegiatan Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	Kode klasifikasi berubah, indikator berubah, satuan indikator berubah
					Pembaharuan	1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen		Pembaharuan	1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	
1.04.03.203	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	Ha	Tetap	1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	Ha	Tetap	Tetap	1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	Ha	Tetap
					Tetap	1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah		Tetap	1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	

					Pena mbah an	1.04.03. 2.03.000 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/P eremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/Pe remajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/P eremajaan Permukiman Kumuh	Lapor an		Pena mbah an	1.04.03. 2.03.000 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/P eremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/Pe remajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggara an Pemugaran/P eremajaan Permukiman Kumuh	Lapo ran	
1.04.03 .203.07	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya a Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Doku men	Tetap	1.04.03. 2.03.000 7	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Doku men	Kode klasifikasi berubah	Tetap	1.04.03. 2.03.000 7	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggara an Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Doku men	Kode klasifikasi berubah
					Pena mbah an	1.04.03. 2.03.000 9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha		Pena mbah an	1.04.03. 2.03.000 9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	
					Pena mbah an	1.04.03. 2.03.001 2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit		Pena mbah an	1.04.03. 2.03.001 2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	
1.04.03 .203.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya a Pembangunan Peremajaan/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	Pemu takhir an	1.04.03. 2.03.001 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah	Pemu takhir an	1.04.03. 2.03.001 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah
1.04.03 .203.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/P emugaran Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/P emugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/P emugaran Permukiman Kumuh (Dokumen)	Doku men	Peno naktif an	1.04.03. 2.03.001 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Masuk ke dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh (row H34)	Peno naktif an	1.04.03. 2.03.001 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	Masuk ke dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab (Indikator program 2)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Formula : Jumlah unit rumah yang direhab / Jumlah RTLH di Kabupaten * 100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.04.03.203.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit Rumah							Tetap	1.04.03.203.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit Rumah	Kode klasifikasi berubah		
					Pena mbahan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun	%		Pena mbahan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun	%		
									Formulasi : (Jumlah RTLH ang diperbaiki atau dibangun / Jumlah rencana unit RTLH yang akan ditangani) x 100%								Formulasi : (Jumlah RTLH yang diperbaiki atau dibangun / Jumlah rencana unit RTLH yang akan ditangani) x 100%		
					Pena mbahan	1.04.04.2.01	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	<i>Unit Rumah</i>		Pena mbahan	1.04.04.2.01	<i>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki dan Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	<i>Unit Rumah</i>		
					Pena mbahan	1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Unit Rumah		Pena mbahan	1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di	Unit Rumah		

							Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki					Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman	%	Tetap	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Tetap	Tetap	01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	Tetap
			(Jumlah pembangunan ruas jalan / Jumlah ruas jalan * 100) + (Jumlah pembangunan jamban / Jumlah kebutuhan jamban * 100)						Formulasi : (Akumulasi jumlah pembangunan ruas jalan / Jumlah ruas jalan keseluruhan * 100%) + (Jumlah pembangunan jamban / Jumlah kekurangan kepemilikan jamban * 100%)							Formulasi : (Akumulasi jumlah pembangunan ruas jalan / Jumlah ruas jalan keseluruhan * 100%) + (Jumlah pembangunan jamban / Jumlah kebutuhan kepemilikan jamban * 100%)		
1.04.05.201	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Terlaksananya penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Jumlah Penyediaan PSU</i>	%	Tetap	1.04.05.2.01	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan PSU di Perumahan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan</i>	%	Tetap	Tetap	1.04.05.2.01	<i>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Terlaksananya Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan</i>	%	Tetap
1.04.05.201.01	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Kode klasifikasi berubah	1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Kode klasifikasi berubah	Kode klasifikasi berubah	1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	Kode klasifikasi berubah
1.04.05.201.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Pemukiran	1.04.05.2.012.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	Kode klasifikasi berubah	Pemukiran	1.04.05.2.012.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	Kode klasifikasi berubah

1.04.05.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Kode klasifikasi berubah	1.04.05.2012.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Kode klasifikasi berubah	Kode klasifikasi berubah	1.04.05.2012.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Kode klasifikasi berubah
					Pembahasan	1.04.05.2012.0006	Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok		Pembahasan	1.04.05.2012.0006	Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	
					Pembahasan	1.04.05.2012.0007	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi		Pembahasan	1.04.05.2012.0007	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	
					Pembahasan	1.04.05.2012.0008	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi		Pembahasan	1.04.05.2012.0008	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	
1.04.05.201.05	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Pemukhtahiran	1.04.05.2012.00010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Kode klasifikasi berubah	Pemukhtahiran	1.04.05.2012.00010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Kode klasifikasi berubah
					Pembahasan	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	Meningkatnya Pengembang yang Bersertifikasi	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi	%		Pembahasan	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	Meningkatnya Pengembang yang Bersertifikasi	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi	%	

			Jumlah korban bencana yang ditangani / Jumlah korban bencana * 100						Formulasi : ((Jumlah rumah korban bencana yang tertangani / Jumlah rumah korban bencana bencana keseluruhan) + (Jumlah rumah tangga terkena relokasi yang terfasilitasi penyediaan rumah layak huni / Jumlah rumah rumah tangga yang terkena relokasi keseluruhan) x 100%)						Formulasi : ((Jumlah rumah korban bencana yang tertangani / Jumlah rumah korban bencana bencana keseluruhan) + (Jumlah rumah tangga terkena relokasi yang terfasilitasi penyediaan rumah layak huni / Jumlah rumah rumah tangga yang terkena relokasi keseluruhan) x 100%)			
1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi kabupaten/kota	Dokumen	Tetap	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap	Tetap	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap
-	-	-	-	-	Pembaharuan	1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	-	Pembaharuan	1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	-
1.04.02.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembaharuan	1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah	Pembaharuan	1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah

1.04.02.2.01.004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	Tetap	1.04.02.2.01.004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	Tetap	Tetap	1.04.02.2.01.004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	Tetap
1.04.02.2.01.05	Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan terverifikasinya Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Pemu takhiran	1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah	Pemu takhiran	1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah
1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan yang dilakukan	kali	Tetap	1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan yang Dilakukan	kali	Tetap	Tetap	1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan yang Dilakukan	kali	Tetap
1.04.02.2.02.03	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	orang	Pemu takhiran	1.04.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	orang	Kode klasifikasi, Sub Kegiatan berubah	Pemu takhiran	1.04.02.2.02.0009	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	orang	Kode klasifikasi, Sub Kegiatan berubah
1.04.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah izin SKGB yang diterbitkan	Dokumen	Tetap, tetapi tidak diam bil untuk Renstra 2025 - 2029	1.04.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah izin SKGB yang diterbitkan	Dokumen	Tetap, tetapi tidak diam bil untuk Renstra 2025 - 2029	Tetap, tetapi tidak diam bil untuk Renstra 2025 - 2029	1.04.02.2.07	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah izin SKGB yang diterbitkan	Dokumen	Tetap

1.04.02.207.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	Pemu takhir an (kode klasifikasi), Tetapi tidak diambil di Renstra 2025-2029	1.04.02.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	kode klasifikasi berubah	Pemu takhir an (kode klasifikasi), Tetapi tidak diambil di Renstra 2025-2029	1.04.02.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	kode klasifikasi berubah
1.04.03.201	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Dokumen	Pemu takhir an (kode klasifikasi)	1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	Kode klasifikasi berubah	Pemu takhir an (kode klasifikasi)	1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	Kode klasifikasi berubah
1.04.02.206.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	Tetap	1.04.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	kode klasifikasi berubah	Tetap	1.04.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	kode klasifikasi berubah
1.04.02.203	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Tetap	1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Tetap	Tetap	1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Tetap
1.04.02.203.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Pena naktif an	1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Kode klasifikasi, Sub Kegiatan berubah	Pena naktif an	1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	Kode klasifikasi, Sub Kegiatan berubah

1.04.02.203.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Unit Rumah	Tetap	1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Kode klasifikasi berubah	Tetap	1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	Kode klasifikasi berubah
					Pembah	1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah		Pembah	1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	
1.04.02.203.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terbangun	Unit Rumah	Pemutakhir	1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah	Pemutakhir	1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Kode klasifikasi berubah, Sub Kegiatan berubah, kinerja berubah, Indikator berubah
	Urusan Pertanahan																	
Tujuan 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan		Persentase Pengelolaan Pertanahan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Formula : ((Jumlah tanah aset Pemda yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pemda/Jumlah tanah aset Pemda)*100 % + (Jumlah tanah aset pemda yang memiliki dokumen administrasi lengkap)/Jumlah tanah Aset Pemda)*100 %)/2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan		Presentase Layanan Pertanahan Yang Baik	%	Berubah		Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka		Berubah		Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Angka	

							Tanah						Tanah			
			<p>Formula : $\frac{((\text{Jumlah penempatan persetujuan lokasi pembangunan}) / \text{jumlah kebutuhan penempatan persetujuan lokasi pembangunan}) * 100\% + (\text{Jumlah pengadaan tanah yang selesai} / \text{Jumlah permohonan pengadaan tanah}) * 100\% + (\text{Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun} / \text{Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan}) * 100\% + (\text{Jumlah penyelesaian sengketa tanah} / \text{jumlah sengketa tanah yang masuk}) * 100\%}{4}$</p>					<p>Formula : $\frac{((\text{Jumlah permohonan pengadaan tanah yang diproses} / \text{Jumlah permohonan pengadaan tanah} * 100\%) + (\text{Jumlah penempatan persetujuan lokasi pembangunan} / \text{Jumlah kebutuhan penempatan persetujuan lokasi pembangunan} * 100\%) + (\text{Jumlah penyelesaian sengketa tanah} / \text{Jumlah laporan sengketa yang masuk} * 100\%) + (\text{Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun (TKD)} / \text{Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan (TKD)} * 100\%))}{4}$</p>					<p>Formula : $\frac{((\text{Jumlah permohonan pengadaan tanah yang diproses} / \text{Jumlah permohonan pengadaan tanah} * 100\%) + (\text{Jumlah penempatan persetujuan lokasi pembangunan} / \text{Jumlah kebutuhan penempatan persetujuan lokasi pembangunan} * 100\%) + (\text{Jumlah penyelesaian sengketa tanah} / \text{Jumlah laporan sengketa yang masuk} * 100\%) + (\text{Jumlah inventarisasi pertanahan yang disusun (TKD)} / \text{Jumlah kebutuhan inventarisasi pertanahan (TKD)} * 100\%))}{4}$</p>			
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa garapan	%	Tetap	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	Tetap	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%

			Jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan dengan mediasi / Jumlah laporan sengketa tanah garapan * 100						Formulasi : (Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang terselesaikan / Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang masuk x 100%)							Formulasi : (Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang terselesaikan / Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang masuk x 100%)		
2.10.04.201	Kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan dalam kabupaten/kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	Pemukhtahir an	2.10.04.201	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	Tetap	Pemukhtahir an	2.10.04.201	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	%	Tetap
2.10.04.201.02	Sub Kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Mediasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	Pemukhtahir an	2.10.04.201.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	kode klasifikasi berubah; Sub Kegiatan berubah	Pemukhtahir an	2.10.04.201.0004	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	kode klasifikasi berubah; Sub Kegiatan berubah
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase masyarakat yg menerima ganti kerugian	%	Tetap	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	Tetap	Tetap	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	Tetap
			Persentase masyarakat penerima ganti kerugian santunan tanah untuk pembangunan / Jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan * 100						Formulasi : (Jumlah pihak yang mendapat ganti kerugian dan santunan / Jumlah pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dan santunan secara keseluruhan x 100%)							Formulasi : (Jumlah pihak yang mendapat ganti kerugian dan santunan / Jumlah pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dan santunan secara keseluruhan x 100%)		

2.10.05.201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	%	Tetap	2.10.05.201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	Tetap	Tetap	2.10.05.201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	Tetap
2.10.05.201.01	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Dokumen	Tetap	2.10.05.201.0001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap	2.10.05.201.0001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerimaan Santunan Tanah	Dokumen	kode klasifikasi berubah
2.10.05.201.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap	2.10.05.201.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap	2.10.05.201.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah
					Pembahasan	2.10.05.201.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan		Pembahasan	2.10.05.201.0005	Sub Kegiatan Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terlaksananya Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	Tetap	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan	Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan	%	Tetap	Tetap	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya Ketersediaan Tanah yang Siap Diredistribusikan	Persentase Tersedianya Tanah yang siap Diredistribusikan	%	Tetap

			Jumlah penerima redistribusi tanah dan ganti kerugian proqram tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee / Jumlah usulan redistribusi tanah dan ganti kerugian proqram tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee * 100	%	Tetap				Formulasi : (Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisa si / Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan x 100%)							Formulasi : (Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisa si / Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan x 100%)	%	Tetap
2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum	%	Tetap	2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Tetap	Tetap	2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah	%	Tetap
2.10.06.201.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Pemu takhiran Tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.06.2.01.0008	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek Redistribusi Tanah		Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah; Sub Kegiatan berubah	Pemu takhiran Tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.06.2.01.0008	Sub Kegiatan Inventarisasi Subyek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah; Sub Kegiatan berubah
2.10.06.201.03	Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	Pemu takhiran Tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025	2.10.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Pemu takhiran Tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025	2.10.06.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen	kode klasifikasi berubah

	<i>ota</i>	<i>ota</i>					<i>ota</i>						<i>ota</i>					
2.10.06.202.01	Sub kegiatan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap	2.10.06.2.02.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap	2.10.06.2.02.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah
2.10.06.202.02	Sub kegiatan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya pengelolaan tanah kosong yang dimanfaatkan	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap
			Jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan / Jumlah hasil identifikasi tanah kosong * 100						Jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan / Jumlah hasil identifikasi tanah kosong * 100							Jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan / Jumlah hasil identifikasi tanah kosong * 100		
2.10.08.201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dimanfaatkan	%	Tetap

2.10.08.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	kode klasifikasi berubah	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	kode klasifikasi berubah
2.10.08.202	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata	Ha	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata	Ha	Tetap	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong	Akumulasi luas tanah kosong yang didata	Ha	Tetap
2.10.08.202.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	Laporan	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	Laporan	kode klasifikasi berubah	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	Laporan	kode klasifikasi berubah
2.10.08.202.02	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.08.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	kode klasifikasi berubah
2.10.10	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Terlaksananya penatagunaan tanah	Persentase tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya	%	Tetap	2.10.10	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	%	Tetap	Tetap	2.10.10	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana	%	Tetap
			Jumlah tanah aset Pemda yang teridentifikasi perencanaan penggunaannya / Jumlah aset Pemda * 100					Formulasi : (Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi / Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan x 100%)								Formulasi : (Akumulasi jumlah kecamatan yang diinventarisasi / Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Pasuruan x 100%)		

2.10.10.201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset PEMDA dan pelaksanaan konsolidasi tanah	Jumlah bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah aset PEMDA dan pelaksanaan konsolidasi tanah	bidang tanah	Tetap	2.10.10.201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Tetap	Tetap	2.10.10.201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Tetap		
2.10.10.201.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Tetap	2.10.10.201.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	kode klasifikasi berubah	Tetap	2.10.10.201.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	kode klasifikasi berubah		
2.10.10.201.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Tetap, tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.10.201.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah	Tetap, tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.10.201.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	kode klasifikasi berubah		
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	%	Tetap Tetap tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	Persentase Pemanfaatan Aset Pemda yang termanfaatkan	%	Dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah; Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota; Program Penatagunaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah aset Pemda yang termanfaatkan / Jumlah aset Pemda keseluruhan * 100						Jumlah aset Pemda yang termanfaatkan / Jumlah aset Pemda keseluruhan * 100											
2.10.09.201	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah	rekomendasi	Tetap Tetap tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.09.201	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Terlaksananya rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah	Jumlah rekomendasi penerbitan Izin membuka Tanah	rekomendasi										

2.10.09 .202.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Dokumen	Pennakrifan Tetapi tidak diambill untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.09. 2.01.000 1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	
2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Terlaksananya a Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase Pengurusan Hak Atas Tanah	%	Tetap tetapi tidak diambill untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Terlaksananya Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase Pengurusan Hak Atas Tanah	%	Dialihkan ke sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah; Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota; Program Penatagunaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	
			Jumlah aset yang sudah terurus administrasinya / Jumlah aset tanah pemerintah * 100					(Jumlah pengurusan hak atas tanah yang dilaksanakan / Jumlah pengurusan hak atas tanah yang dibutuhkan) x 100%					-	-	-	-	-	-	-
2.10.12 .701	<i>Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Terlaksananya Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Jumlah Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Kegiatan</i>	Tetap tetapi tidak diambill untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.12. 701	<i>Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Terlaksananya a Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Jumlah Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah</i>	<i>Kegiatan</i>			-	-	-	-	-	-	-
2.10.12 .701.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Pemerintah	Laporan	Tetap tetapi tidak diambill untuk Renstra 2025 - 2029	2.10.12. 7.01.000 1	Sub Kegiatan Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan			-	-	-	-	-	-	-
Sasaran 3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP PD	Nilai	Tetap		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP PD	Nilai	Tetap	Tetap		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP PD	Nilai	Tetap	

			Formula : Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal						Formula : Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal							Formula : Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai komponen pelaporan kinerja + Nilai komponen evaluasi kinerja internal		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	%	Tetap	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	%	Tetap	Tetap	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Terlaksananya administrasi tata kelola PD dengan baik	Persentase Dokumen/Laporan administrasi PD yang baik atau sesuai regulasi	%	Tetap
1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%	Tetap	1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selaras	Persentase konsistensi indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi	%	Tetap
1.04.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tetap	1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tetap	Tetap	1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tetap
1.04.01.2.01.002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tetap, tetapi tidak diambil di Renstra 2025-2029	1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tetap, tetapi tidak diambil di Renstra 2025-2029	Tetap	1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Tetap
					Pembahasan	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Laporan		Pembahasan	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Laporan	

								Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%	Tetap	1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	%	Tetap
1.04.01.2.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Tetap	1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Tetap
					Pena mbahan	1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Pena mbahan	1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	
					Pena mbahan	1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Pena mbahan	1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	
1.04.01.2.02.007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Tetap	1.04.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Tetap	Tetap tetapi tidak diambil untuk Renstra 2025 - 2029	1.04.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	Tetap
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%	Tetap	1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dengan baik	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	%	Tetap

1.04.01.2.05.009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Tetap	1.04.01.2.05.009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Tetap	Tetap	1.04.01.2.05.009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Tetap
1.04.01.2.05.010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Tetap	1.04.01.2.05.010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Tetap	Tetap	1.04.01.2.05.010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Tetap
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%	Tetap	1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya a pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya a pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	%	Tetap
1.04.01.2.07.002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tetap	1.04.01.2.07.002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.07.002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tetap
1.04.01.2.07.010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tetap	1.04.01.2.07.010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.07.010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tetap
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%	Tetap	1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya penunjang operasional kantor	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	%	Tetap
1.04.01.2.08.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Tetap	1.04.01.2.08.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.08.001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Tetap
1.04.01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tetap	1.04.01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tetap

1.04.01.2.08.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tetap	1.04.01.2.08.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.08.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tetap
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	%	Tetap	1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase BMD kondisi baik	%	Tetap
1.04.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tetap	1.04.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Tetap
1.04.01.2.09.005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Tetap	1.04.01.2.09.005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.09.005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Tetap
1.04.01.2.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap	1.04.01.2.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap
1.04.01.2.09.010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap	1.04.01.2.09.010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap	Tetap	1.04.01.2.09.010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	Tetap
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	Tetap	1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	%	Tetap

1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap
1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Tetap
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tetap	1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tetap
1.04.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Tetap	1.04.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Tetap
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tetap	1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tetap	Tetap	1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Tetap

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1 *Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- 3 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4 *Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 *Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7 *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Urusan Pemerintahan Wajib

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

II Program Kawasan Permukiman

- 1 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- 2 *Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*
 - Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - Sub Kegiatan Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 3 *Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha*
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

III Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- 1 *Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota*
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

IV Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1 *Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU
- Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

V Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1 *Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

VI Program Pengembangan Perumahan

1 *Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2 *Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan

3 *Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

4 *Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

VII Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1 *Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah*

Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

VIII Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1 *Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

IX Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- 1 *Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.
- 2 *Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

X Program Penatagunaan Tanah

- 1 *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota*
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan adalah sebesar Rp. 28.569.973.926,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu*

Sembila Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan sumber dana sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum	:	Rp.	24.369.973.769,-
Pajak Rokok	:	Rp.	1.000.000.000,-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	:	Rp.	3.200.000.157,-
Total	:	Rp.	28.569.973.926,-

3.3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026

Sesuai dengan grand design RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan turut mendukung prioritas pembangunan daerah 2 yaitu “Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/ usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas”, dan mendukung program prioritas :

- (1) Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan.
- (2) Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata.
- (3) Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/ Cor.

Secara detail program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung prioritas daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 berikut :

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Daerah Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

IKU RPJMD	Tema 2026	Prioritas Pembangunan			IKU PD	Subkegiatan	Kegiatan	Program
		Prioritas Pembangunan	Sub Prioritas	33 Program Prioritas				
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah melalui integrasi dan kolaborasi lintas sektoral	PPD 2 : Peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinyuitas bahan baku/sumber daya alam/agro untuk pasokan industri/ usaha pengolahan dan ketahanan pangan dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan destinasi kepariwisataan	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Kawasan Permukiman
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh		
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

						Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		
				Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
				Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/ Cor		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Selain mendukung prioritas daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan juga berkewajiban untuk melaksanakan SPM sebagaimana yang diamatkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan terdiri dari :

❖ Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- (1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Di tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebesar Rp. 200.000.000,- yang bersumber dari DAU. Begitu pula di tahun 2026 tetap mengalokasikan dengan anggaran yang sama.

- (2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk pelayanan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota, hingga tahun 2026 belum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan karena belum adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program relokasi di Kabupaten Pasuruan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan SPM yaitu :

- Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3.3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Proyek Strategis

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tahun 2024 – 2026 diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan dan direpresentasikan melalui program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung proyek strategis tersebut meliputi :

- Program Kawasan Permukiman
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
 - Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- Program Penyelenggaraan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang mendukung proyek strategis dapat dilihat pada Tabel 3.3.3 berikut :

Tabel 3.3.3
Matrik Program Prioritas Bupati Pada
Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

No	Uraian 33 Program Prioritas	Perangkat Daerah Pelaksana	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Indikator Subkegiatan	Target Indikator Subkegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Sumber dana (DAU/ DAK/ DBHBHT/ ... disebutkan)	Lokasi sasaran			Ket.
										titik koordinat (Sistim Geografis dalam satuan derajat menit detik)**)	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penataan kawasan kumuh/kawasan nelayan dan Pembangunan infrastruktur pendukung (tambatan perahu, tangkis laut, dan lainnya) untuk petani tambak dan nelayan	DPKP	Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	260.000.000	DAU	-	-	-	
					Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10,03 Ha	3.500.000.000	DAU	-	Kalirejo	Kraton	
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	30 unit rumah	1.110.000.000	DAU	-	Kalirejo	Kraton	
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	20.000.000	DAU	-	Kalirejo	Kraton	

			Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	91 Unit Rumah	1.982.218.750	DAU	-	-	Beji, Gempol, Gondangwetan, Kraton, Lumbang, Pasrepan, Puspo, Rejoso, Tukur, Winongan	
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	10 Unit Rumah	211.000.000	DAU	-	-	Beji, Gempol, Gondangwetan, Kraton, Lumbang, Pasrepan, Puspo, Rejoso, Tukur, Winongan	
2	Peningkatan infrastruktur jalan menuju pusat produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta dukung infrastruktur menuju daerah wisata	DPKP	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	17 Lokasi	6.000.000.000	Pajak rokok & PBJT	-	-	Lekok, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Lumbang, Bangil, Gempol, Pandaan, Prigen, Purwodadi, Rejoso, Sukorejo, Wonorejo	
					Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1 Lokasi	1.000.000.000	DAU	-	-	Lekok, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Lumbang, Bangil, Gempol, Pandaan, Prigen, Purwodadi, Rejoso, Sukorejo, Wonorejo	
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	450.000.000	DAU	-	-		

3	Pembangunan jalan poros Kabupaten dengan standart Hotmix/ Cor	DPKP	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	100.000.000	DAU	-	Bangil
				Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	DAU	-	Bangil
				Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Laporan	10.000.000.000	DAU	-	-

3.3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Inovasi Perangkat Daerah

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna data sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pembangunan infrastruktur permukiman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 12 mengamanatkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, termasuk di dalamnya database infrastruktur permukiman secara terpadu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mengamanatkan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Dengan memperhatikan kebutuhan data dan informasi tersebut, maka di tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan membuat 2 (dua) inovasi sebagai berikut :

- SIRUPAWAN : Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
- OMAHKU : Satu Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman PASURUAN Kabupaten Pasuruan

Tahun 2026 kedua inovasi tersebut akan dikembangkan lebih luas lagi cakupan datanya dan sekaligus melakukan updating data setiap tahunnya. Kedua inovasi tersebut merupakan sistem berbasis web dan merupakan situs resmi yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung inovasi perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.3.4
Program Pendukung Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2026
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Inovasi	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
SIRUPAWAN (Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	400.000.000
OMAHKU PASURUAN (Satu Peta Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan)				
			TOTAL	400.000.000

3.3.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung IK RPJPD

Dalam mendukung pencapaian IK RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan dan direpresentasikan melalui program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung proyek strategis tersebut meliputi :

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
- Program Kawasan Permukiman
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan yang mendukung proyek strategis dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 berikut :

Tabel 3.3.5
Program Pendukung IK RPJPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

IUP RPJPD	Formula/ Definisi Operasional	Variabel Pembentuk (Metadata)	Target 2026	Ada/Tidak	Subkegiatan	Kegiatan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi : a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.	(Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan / Jumlah rumah tangga) x 100%	79,28%	Ada	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Permukiman

	<p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi 4 kriteria sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 2. Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m². 3. Memiliki akses air minum layak. 4. Memiliki akses sanitasi layak. 				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	(sepuluh) Ha	Pengembangan Perumahan
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2026 mengacu pada sasaran Perangkat Daerah yaitu : (1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman; (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah; dan (3) Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Untuk sasaran pertama "*Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman*" dengan indikator "*Persentase Sarana Prasarana di Perumahan dan Permukiman dalam Kondisi Baik*" meliputi 3 (tiga) penanganan yaitu :

- Pemenuhan Pelayanan SPM urusan Perumahan Rakyat.
- Pencegahan dan penanganan kumuh.
- Ketersediaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Untuk penanganan tersebut diampu oleh 2 (dua) bidang yaitu Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman.

Sasaran kedua "*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*", dengan indikator "*Nilai SAKIP Perangkat Daerah*" meliputi program kegiatan yang menunjang urusan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan. Sasaran ketiga "*Terciptanya Keadilan Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah*" dengan indikator "*Indeks Tertib Administrasi Pertanahan*" meliputi penanganan terkait :

- Penyelesaian sengketa tanah.
- Penyelesaian ganti kerugian untuk pembangunan.
- Redistribusi dan ganti kerugian program tanah absentee.
- Koordinasi terkait perencanaan penggunaan tanah.

Tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu "Hilirisasi industri pengolahan potensi unggulan daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan" dengan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah, dimana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan mendukung prioritas pembangunan daerah ke-3 yaitu pengembangan industri pengolahan unggulan daerah dan hasil produksi yang kompetitif, dengan sub prioritas peningkatan infrastruktur

pendukung pengembangan kawasan destinasi kepariwisataan. Prioritas pembangunan tersebut merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan pembangunan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan secara bertahap.

Pendanaan Rencana Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan tahun 2026 dialokasikan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Astacita Presiden, pemenuhan pelayanan SPM, pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dan juga inovasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Dana Alokasi Umum	:	Rp.	24.369.973.769,-
Pajak Rokok	:	Rp.	1.000.000.000,-
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	:	Rp.	3.200.000.157,-
Total	:	Rp.	28.569.973.926,-

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 Kabupaten Pasuruan terlampir pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Administrasi Tata Kelola PD dengan Baik	Persentase Dokumen/ Laporan Administrasi PD yang Baik atau Sesuai Regulasi	Kab. Pasuruan	100%	Rp 7.067.224.848,10	DAU		100%	Rp 8.283.982.643,00
1.04.01.2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Selaras</i>	<i>Persentase Konsistensi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dokumen Rencana, Rnggaran dan Evaluasi</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 59.841.454,85</i>			<i>100%</i>	<i>Rp 71.100.000,00</i>
1.04.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasuruan	12 Dokumen	Rp 39.768.054,85	DAU		12 Dokumen	Rp 40.700.000,00
						Belanja operasi : Rp 39.768.054,85				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 39.768.054,85				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.01.2.01.002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pasuruan	4 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU		4 Dokumen	Rp 10.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				

						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasuruan	8 Laporan	Rp 19.973.400,00	DAU	8 Laporan	Rp 20.400.000,00
						Belanja operasi : Rp 19.973.400,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 19.973.400,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan yang akurat	Persentase Laporan Keuangan yang Sesuai dengan Ketentuan dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Pasuruan	100%	Rp 4.868.756.680,10		100%	Rp 5.564.319.749,24
1.02.01.2.02.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasuruan	32 Orang / Bulan	Rp 4.779.976.680,10	DAU	32 Orang / Bulan	Rp 5.473.507.249,24
						Belanja operasi : Rp 4.779.976.680,10			
						Belanja pegawai : Rp 4.779.976.680,10			
						Belanja barang dan jasa : Rp -			
						Belanja bunga : Rp -			

						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.02.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasuruan	12 Dokumen	Rp 7.480.000,00	DAU	12 Dokumen	Rp 7.480.000,00
						Belanja operasi : Rp 7.480.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 7.480.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.02.00 03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasuruan	12 Dokumen	Rp 81.300.000,00	DAU	12 Dokumen	Rp 83.332.500,00
						Belanja operasi : Rp 81.300.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 81.300.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			

					jasa				
					Belanja bunga	: Rp	-		
					Belanja subsidi	: Rp	-		
					Belanja hibah	: Rp	-		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		
					Belanja modal	: Rp	100.000,00		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		
					Belanja transfer	: Rp	-		
1.04.01.2.07.00 10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Pasuruan	1 unit		Rp 52.738.597,50	DAU	4 unit Rp 100.000.000,00
					Belanja operasi	: Rp	-		
					Belanja pegawai	: Rp	-		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	-		
					Belanja bunga	: Rp	-		
					Belanja subsidi	: Rp	-		
					Belanja hibah	: Rp	-		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		
					Belanja modal	: Rp	52.738.597,50		
					Belanja tidak terduga	: Rp	-		
					Belanja transfer	: Rp	-		
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penunjang Operasional Kantor	Persentase Jasa Penunjang Operasional Kantor yang Tersedia	Kab. Pasuruan	100%		Rp 509.233.821,00	DAU	100% Rp 514.658.785,00
1.04.01.2.08.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasuruan	2 Laporan		Rp 3.665.500,00	DAU	2 Laporan Rp 3.859.535,00
					Belanja operasi	: Rp	3.665.500,00		
					Belanja pegawai	: Rp	-		
					Belanja barang dan jasa	: Rp	3.665.500,00		
					Belanja bunga	: Rp	-		
					Belanja subsidi	: Rp	-		
					Belanja hibah	: Rp	-		
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-		
					Belanja modal	: Rp	-		

						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.08.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pasuruan	36 Laporan	Rp 291.237.176,00	DAU	36 Laporan	Rp 296.468.105,00
						Belanja operasi : Rp 291.237.176,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 291.237.176,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.08.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	12 Laporan	Rp 214.331.145,00	DAU	12 Laporan	Rp 214.331.145,00
						Belanja operasi : Rp 214.331.145,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 214.331.145,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	Kab. Pasuruan	100%	Rp 692.834.040,00		100%	Rp 753.340.421,00
1.04.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pasuruan	52 Unit	Rp 566.758.020,00	DAU	52 Unit	Rp 570.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 566.758.020,00			
						Belanja pegawai : Rp -			

						Belanja barang dan jasa : Rp 566.758.020,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.01.2.09.0005	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Pasuruan	83 Unit	Rp 6.080.580,00	DAU		83 Unit	Rp 6.232.595,00
						Belanja operasi : Rp 6.080.580,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 6.080.580,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	2 Unit	Rp 55.500.000,00	DAU		2 Unit	Rp 111.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 55.500.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 55.500.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				

						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.01.2.09.00 10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Pasuruan	91 Unit	Rp 64.495.440,00	DAU	91 Unit	Rp 66.107.826,00	
						Belanja operasi : Rp	64.495.440,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	64.495.440,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Umum PD	Kab. Pasuruan	100%	Rp 743.264.134,65		100%	Rp 766.698.664,76	
1.04.01.2.06.00 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	11 Paket	Rp 10.347.812,94	DAU	11 Paket	Rp 10.606.500,00	
						Belanja operasi : Rp	10.347.812,94			
						Belanja pegawai :				
						Belanja barang dan jasa : Rp	10.347.812,94			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.01.2.06.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	22 Paket	Rp 31.071.175,50	DAU	22 Paket	Rp 31.848.000,00	
						Belanja operasi : Rp	31.071.175,50			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	31.071.175,50			

						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.01.2.06.00 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pasuruan	49 Paket	Rp 65.497.615,71	DAU		49 Paket	Rp 71.987.946,00
						Belanja operasi : Rp 65.497.615,71				
						Belanja pegawai : Rp				
						Belanja barang dan jasa : Rp 65.497.615,71				
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.01.2.06.00 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pasuruan	11 Paket	Rp 34.103.530,50	DAU		11 Paket	Rp 34.956.118,76
						Belanja operasi : Rp 34.103.530,50				
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp 34.103.530,50				
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			

						jasa				
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.03.2.02	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi/ Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kawasan Kumuh	Kawasa n Kumuh	100%		Rp 300.000,00		100%	Rp 60.000.000,00
1.04.03.2.02.00 08	Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kawasa n Kumuh	1 Dokumen		Rp 100.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.03.2.02.00 12	Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Dibentuk/Dibina	Kawasa n Kumuh	1 kelompok masyarak at		Rp 100.000,00	DAU	1 kelompok masyarakat	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			

						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Tuntas	Kawasan Kumuh	105,98 Ha	Rp 664.399.970,00		1 Ha	Rp 3.966.000.000,00
1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh	1 Laporan	Rp 100.000,00	DAU	1 Laporan	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			

						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kawasan Kumuh	1 Dokumen	Rp 260.000.000,00	DAU		1 Dokumen	Rp 260.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	260.000.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	260.000.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.03.2.03.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kawasan Kumuh	1 Ha	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung : 33 Program Prioritas Bupati	0,1 Ha	Rp 1.000.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.03.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan Kumuh	5 Unit	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung program 3 juta rumah	10 Unit	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			

						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.03.2.03.00 13	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Kawasa n Kumuh	0,1 Ha	Rp 403.999.970,00	DAU	Menduku ng : 33 Program Prioritas Bupati	1 Ha	Rp 2.000.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 403.999.970,00				
						Belanja pegawai : Rp				
						Belanja barang dan jasa : Rp 403.999.970,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.03.2.03.00 02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Pasurua n	30 Unit Rumah	Rp 100.000,00	DAU	Menduku ng : 33 Program Prioritas Bupati	30 Unit Rumah	Rp 666.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				

						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Terpenuhinya Rumah Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diperbaiki atau Dibangun	Kab. Pasuruan	0,0039%	Rp 1.982.318.750,00	DAU		0,0079%	Rp 2.240.000.000,00
1.04.04.2.01	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Akumulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab	Kab. Pasuruan	101 Unit Rumah	Rp 1.982.318.750,00			110 Unit Rumah	Rp 2.240.000.000,00
1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Pasuruan	91 Unit Rumah	Rp 1.982.218.750,00	DAU	Mendukung : Astacita Presiden	100 Unit Rumah	Rp 2.220.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 1.982.218.750,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 162.218.750,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp 1.820.000.000,00				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.04.2.01.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kab. Pasuruan	10 unit rumah	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung : Astacita Presiden	10 Unit Rumah	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				

						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Kab. Pasuruan	5,08%	Rp 3.598.000.157,90	DAU		6,27%	Rp 3.340.000.000,00
1.04.05.2.01	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyelenggaraan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan PSU di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Pasuruan	0,74%	Rp 3.598.000.157,90			1,19%	Rp 3.340.000.000,00
1.04.05.2.01.001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00	DAU		3 Dokumen	Rp 400.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.05.2.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Pasuruan	17 Lokasi	Rp 3.497.500.157,90	DAU	Mendukung : Astacita Presiden dan 33 Program Prioritas Bupati	6 Lokasi	Rp 2.000.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 2.212.691.807,90				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 2.212.691.807,90				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp 1.284.808.350,00				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				

1.04.05.2.01.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pasuruan	1 Laporan	Rp 100.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 20.000.000,00	
						Belanja operasi	: Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000,00				
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
1.04.05.2.01.00 06	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah Pelaku Pembangunan yang Tersosialisasikan Standar, Prosedur, dan Kriteria Serah Terima PSU	Kab. Pasuruan	1 Kelompok	Rp 100.000,00	DAU		1 Kelompok	Rp 100.000.000,00	
						Belanja operasi	: Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai	: Rp	-			
						Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000,00				
						Belanja bunga	: Rp	-			
						Belanja subsidi	: Rp	-			
						Belanja hibah	: Rp	-			
						Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
						Belanja modal	: Rp	-			
						Belanja tidak terduga	: Rp	-			
1.04.05.2.01.00 11	Sub Kegiatan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kab. Pasuruan	1 Lokasi	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung : Astacita Presiden dan 33 Program Prioritas Bupati	1 Lokasi	Rp 500.000.000,00	
						Belanja operasi	: Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai	: Rp		-		
						Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000,00				
						Belanja bunga	: Rp		-		
	Belanja subsidi	: Rp	-								

						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.05.2.01.0008	Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Kab. Pasuruan	1 Lokasi	Rp 100.000,00	DAU		1 Lokasi	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Kab. Pasuruan	5 Laporan	Rp 100.000,00	DAU		5 Laporan	Rp 300.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			

1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pengembang yang Bersertifikasi	Persentase Pengembang yang Bersertifikasi	Kab. Pasuruan	2%		Rp 100.000,00	DAU		3%	Rp 20.000.000,00
1.04.06.2.01	<i>Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	<i>Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah, serta Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</i>	<i>Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan bagi Pengembang</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>2 Sertifikat</i>		<i>Rp 100.000,00</i>			<i>2 Sertifikat</i>	<i>Rp 20.000.000,00</i>
1.04.06.2.01.001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kab. Pasuruan	1 Laporan		Rp 100.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi :	Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 100.000,00				
						Belanja bunga :	Rp -				
						Belanja subsidi :	Rp -				
						Belanja hibah :	Rp -				
						Belanja bantuan sosial :	Rp -				
						Belanja modal :	Rp -				
						Belanja tidak terduga :	Rp -				
						Belanja transfer :	Rp -				
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana dan/ atau yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah yang memperoleh Rumah Layak Huni	Kab. Pasuruan	100%		Rp 210.800.000,00	DAU		100%	Rp 2.120.000.000,00
1.04.02.2.01	<i>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana yang Disediakan dan Direhab atau di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>1 Dokumen</i>		<i>Rp 10.300.000,00</i>			<i>1 Dokumen</i>	<i>Rp 240.000.000,00</i>
1.04.02.2.01.002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen		Rp 100.000,00	DAU		1 Dokumen	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi :	Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai :	Rp -				
						Belanja barang dan jasa :	Rp 100.000,00				

						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.02.2.01.00 04	Sub kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00	DAU		1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 10.000.000,00				
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp 10.000.000,00				
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja bantuan : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
1.04.02.2.01.00 09	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU		1 dokumen	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			

1.04.02.2.01.00 10	Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU		1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
					Belanja operasi	: Rp 100.000,00				
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000,00				
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
Belanja tidak terduga	: Rp	-								
Belanja transfer	: Rp	-								
1.04.02.2.02	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Kab. Pasuruan	1 kali	Rp 100.000,00		1 kali	Rp 20.000.000,00	
1.04.02.2.02.00 09	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Kab. Pasuruan	58 Orang	Rp 100.000,00	DAU		58 Orang	Rp 20.000.000,00
					Belanja operasi	: Rp 100.000,00				
					Belanja pegawai	: Rp	-			
					Belanja barang dan jasa	: Rp 100.000,00				
					Belanja bunga	: Rp	-			
					Belanja subsidi	: Rp	-			
					Belanja hibah	: Rp	-			
					Belanja bantuan sosial	: Rp	-			
					Belanja modal	: Rp	-			
Belanja tidak terduga	: Rp	-								
Belanja transfer	: Rp	-								
1.04.02.2.03	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	100%	Rp 200.300.000,00		100%	Rp 360.000.000,00	
1.04.02.2.03.00 01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Pasuruan	5 Unit Rumah	Rp 200.000.000,00	DAU		6 Unit Rumah	Rp 300.000.000,00
					Belanja operasi	: Rp 200.000.000,00				

						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 200.000.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Kab. Pasuruan	48 Rumah Tangga	Rp 100.000,00	DAU	58 Rumah Tangga	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
1.04.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	48 Unit Rumah	Rp 100.000,00	DAU	58 Unit Rumah	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			

						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.02.203.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	5 Unit Rumah	Rp 100.000,00	DAU		5 Unit Rumah	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp -				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp -				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp 100.000,00				
						Belanja transfer : Rp -				
1.04.02.2.06	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tertindakannya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00			1 Dokumen	Rp 1.500.000.000,00
1.04.02.2.06.003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pasuruan	1 Laporan	Rp 100.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 1.500.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
						Belanja tidak terduga : Rp -				
						Belanja transfer : Rp -				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terelesaikannya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	Kab. Pasuruan	100%	Rp 99.999.000,00	DAU	100%	Rp 100.000.000,00
2.10.04.2.01	<i>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 99.999.000,00</i>		<i>100%</i>	<i>Rp 100.000.000,00</i>
2.10.04.2.02.003	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 99.999.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 99.999.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 99.999.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kab. Pasuruan	100%	Rp 14.946.131.200,00	DAU	100%	Rp 5.030.000.000,00
2.10.05.2.01	<i>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah</i>	<i>Kab. Pasuruan</i>	<i>100%</i>	<i>Rp 14.946.131.200,00</i>		<i>100%</i>	<i>Rp 5.030.000.000,00</i>
2.10.05.2.01.001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 10.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			

						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
2.10.05.2.01.00 02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	-	DAU		1 Dokumen Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
2.10.05.2.01.00 03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	Kab. Pasuruan	2 Laporan	Rp	-	DAU		2 Laporan Rp 50.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	-			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	-			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
2.10.05.2.01.00 05	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Terselesaikannya Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan	Kab. Pasuruan	2 Laporan	Rp 14.945.931.200,00	-	DAU		2 Laporan Rp 300.000.000,00

	Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	n	1 Laporan	Belanja operasi : Rp -		1 Laporan	Rp 5.000.000.000,00
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp -			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp 14.945.931.200,00			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Kab. Pasuruan	16,67%	Rp 500.000,00	DAU	8,33%	Rp 185.000.000,00
2.10.06.2.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum	Persentase Penetapan Redistribusi Tanah	Kab. Pasuruan	16,67%	Rp 400.000,00		4,17%	Rp 165.000.000,00
2.10.06.2.01.00 02	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU	1 Dokumen	Rp 105.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp -			
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00			
						Belanja bunga : Rp -			
						Belanja subsidi : Rp -			
						Belanja hibah : Rp -			
						Belanja bantuan sosial : Rp -			
						Belanja modal : Rp -			
						Belanja tidak terduga : Rp -			
						Belanja transfer : Rp -			

2.10.06.2.01.00 04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung : Astacita Presiden	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
	Belanja tidak terduga : Rp -									
	Belanja transfer : Rp -									
2.10.06.2.01.00 06	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Kab. Pasuruan	1 Berita Acara	Rp 100.000,00	DAU	Mendukung : Astacita Presiden	1 Berita Acara	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
						Belanja subsidi : Rp -				
						Belanja hibah : Rp -				
						Belanja bantuan sosial : Rp -				
						Belanja modal : Rp -				
	Belanja tidak terduga : Rp -									
	Belanja transfer : Rp -									
2.10.06.2.01.00 07	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Laporan	Rp 100.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp 100.000,00				
						Belanja pegawai : Rp -				
						Belanja barang dan jasa : Rp 100.000,00				
						Belanja bunga : Rp -				
	Belanja subsidi : Rp -									

						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
2.10.06.2.02	Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase Penetapan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab Pasuruan	16,67%	Rp 100.000,00			16,67%	Rp 20.000.000,00
2.10.06.2.02.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Dokumen	Rp 100.000,00	DAU		1 Dokumen	Rp 20.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			
						Belanja bunga : Rp	-			
						Belanja subsidi : Rp	-			
						Belanja hibah : Rp	-			
						Belanja bantuan sosial : Rp	-			
						Belanja modal : Rp	-			
						Belanja tidak terduga : Rp	-			
						Belanja transfer : Rp	-			
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Terlaksana	Kab. Pasuruan	4,17%	Rp 100.000,00	DAU		8,33%	Rp 228.000.000,00
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya bidang tanah yang teridentifikasi perencanaan penggunaan tanah asset Pemda dan pelaksanaan konsolidasi tanah	Jumlah Bidang Tanah yang Teridentifikasi Perencanaan Penggunaan Tanah Aset Pemda dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Kab Pasuruan	4,17%	Rp 100.000,00			4,17%	Rp 228.000.000,00
2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pasuruan	1 Laporan	Rp 100.000,00	DAU		1 Laporan	Rp 228.000.000,00
						Belanja operasi : Rp	100.000,00			
						Belanja pegawai : Rp	-			
						Belanja barang dan jasa : Rp	100.000,00			

					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	-				
					Belanja modal	:	Rp	-				
					Belanja tidak terduga	:	Rp	-				
					Belanja transfer	:	Rp	-				
								-				
					<i>Total Belanja operasi</i>	:	Rp	12.286.295.778,50				
					Belanja pegawai	:	Rp	4.779.976.680,10				
					Belanja barang dan jasa	:	Rp	5.686.319.098,40				
					Belanja bunga	:	Rp	-				
					Belanja subsidi	:	Rp	-				
					Belanja hibah	:	Rp	-				
					Belanja bantuan sosial	:	Rp	1.820.000.000,00				
					<i>Total Belanja modal</i>	:	Rp	16.283.578.147,50				
					<i>Total Belanja tidak terduga</i>	:	Rp	100.000,00				
					<i>Total Belanja transfer</i>	:	Rp	-				
					Total Belanja PD	:	Rp	28.569.973.926,00				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dan diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Bab Penutup menjelaskan beberapa hal yaitu kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

5.1 Kesimpulan Penting

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. saling bersinergi mendukung tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yaitu “Hilirisasi dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah melalui Integrasi dan Kolaborasi Lintas Sektoral untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”.
2. mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2026.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 yang harus diperhatikan:

1. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta selanjutnya menjadi dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026.
2. Selama pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, apabila terdapat ketidaksesuaian akibat perubahan kondisi atau asumsi yang melandasi perubahan prioritas pembangunan daerah dan diakomodasi dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, maka Renja Perangkat Daerah akan dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2026 meliputi pemantauan atau monitoring pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang ditetapkan dalam APBD dan dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dapat melakukan tindakan koreksi jika diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut setiap triwulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan.
3. Laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada nomor 2, meliputi perkembangan capaian kinerja dan anggaran, faktor pendorong, dan faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan melalui aplikasi atau sistem informasi yang tersedia paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan.
4. Evaluasi dilakukan secara terukur melalui pencapaian target indikator kinerja utama Perangkat Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah dan dasar penentuan target tahun berikutnya.
5. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dalam pelaksanaan triwulan berikutnya dan penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO